

INDUSTRI BATIK DALAM KEMANDIRIAN

KEUANGAN KOTA PEKALONGAN



Nama : Unggul Basuki Primajaya

No. Mahasiswa: 07312457

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

**INDUSTRI BATIK DALAM KEMANDIRIAN
KEUANGAN KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi**

pada Fakultas Ekonomi UII

oleh :

Nama : Unggul Basuki Primajaya

No. Mahasiswa : 07312457

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak pernah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, Februari 2012

Penulis,



(Unggul Basuki Primajaya)

**INDUSTRI BATIK DALAM KEMANDIRIAN
KEUANGAN KOTA PEKALONGAN**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hendi Yogi Prabowo".

(Hendi Yogi Prabowo SE., M.For.Accy., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Industri Batik Dalam Kemandirian Keuangan Kota Pekalongan

Disusun Oleh: UNGGUL BASUKI PRIMAJAYA
Nomor Mahasiswa: 07312457

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 15 Februari 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Hendi Yogi P, SE, M.For.Accy, Ph.D
Penguji I : Drs. Syamsul Hadi, M.Si, Ak

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al Baqarah : 153)

“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya...”

(Q.S. Al Baqarah : 268)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh yang lain. Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al Insiroh : 5-8)

Manusia dinilai bukan dari bagaimana dia menjalani hidup, namun dari bagaimana dia mengambil keputusan dalam hidup dan menjalaninya tanpa menyesalinya.

(Anonymous)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan dan ku dedikasikan untuk kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Sri Kuncoro Pandojopudjo dan Ibunda Tri Lestari, yang selalu memberikan yang terbaik untuk putra tercintanya ini. Terimakasih Ayah Ibu, aku sangat menyayangi kalian.

Untuk sahabat dan teman-temanku yang disaat suka maupun duka selalu ada menemaniku, memberikan semangat dan nasehat untuk kemajuanku. Kalian adalah keluarga kedua bagiku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahilahi rabbil 'aalamiin, puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya ini yang merupakan tugas akhir dalam persyaratan untuk menyelesaikan program Strata-1 pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tidak lupa pula shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya dan keturunannya.

Skripsi dengan judul “**Industri Batik Dalam Kemandirian Keuangan Kota Pekalongan**” ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan di Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah. Semoga hasil karya ini dapat memberikan manfaat terbaik untuk perkembangan ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunannya, Penulis menyadari akan adanya keterbatasan dan kemampuan yang ada, maka dalam menyusun tugas akhir ini tidak lepas dari sumbangan dan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Sri Kuncoro Pandojopudjo dan Ibunda Tri Lestari yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk saya, mendoakan saya,

memberikan dukungan moril dan materil, menyayangi dan merawat saya dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga seperti sekarang ini. Tidak ada yang lebih indah dari cinta orang tua kepada anaknya. Terimakasih Ayah dan Ibu.

2. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk penelitian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA, DBA, Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dra. Isti Rahayu, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Hendi Yogi Prabowo SE., M.For.Accy., Ph.D., yang selalu memberikan bimbingan-bimbingan terbaik untuk saya dan terimakasih atas semua waktu, tenaga, dan kesabarannya hingga skripsi ini terlaksana.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Sahabat-sahabat saya tercinta Asrian, Hage, Arung, Aldo, Lulus, Galih Sanjaya, Impong, Andin, Singgih, Terimakasih atas segala dukungannya. Terimakasih telah menemani selama ini, mendengarkan keluh kesah saya, memberikan masukan yang membangun, menemani menghilangkan penat. Semoga persahabatan kita tidak akan pernah putus dimakan waktu.

9. Teman-teman satu bimbingan Asrian dan Jaim, yang telah banyak membantu. Terimakasih banyak atas bantuan kalian, sukses untuk kita semua.
10. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2007. Terimakasih untuk kekeluargaannya yang luar biasa selama ini.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga kebaikan dan bantuannya dapat menjadi amal yang ikhlas dan di-Ridhoi Allah SWT. Amien.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat Penulis harapkan demi penyempurnaan dan perbaikan karya ini. Akhir harapan, semoga tulisan ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca sekalian.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Februari 2012

Penulis,

(Unggul Basuki Primajaya)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Fokus Penelitian	10
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Manfaat Penelitian	10
1.6. Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN TEORITIK	14
2.1. Pengenalan	14
2.2. Teori Kemandirian Daerah	14
2.2.1. Teori Penganggaran Yang Baik	14
2.2.2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	20
2.2.2.1. Pendapatan Daerah	21
1. Pendapatan Asli Daerah	22
a) Pajak Daerah	22
b) Retribusi Daerah	26
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27
d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27
2. Dana Perimbangan	28
a) Dana Bagi Hasil	29
b) Dana Alokasi Umum	30
c) Dana Alokasi Khusus	33
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	33
2.2.2.2. Belanja Daerah	34
2.2.2.3. Pembiayaan Daerah	35
2.2.3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia	36
2.2.3.1. Kualitas Sumber Daya Manusia	36
1. Tingkat Pendapatan per Kapita	37
2. Tingkat Pendidikan Penduduk	37

3. Tingkat Kesehatan Penduduk	39
2.2.3.2. Kuantitas Sumber Daya Manusia	40
1. Jumlah Penduduk	40
2. Pertumbuhan Penduduk	42
3. Persebaran/Kepadatan Penduduk	43
2.2.4. Peraturan Pemerintah	45
2.3. Teori Manajemen Strategi	47
2.3.1. Strategi	47
2.3.2. Tipe Strategi	49
2.3.3. Tingkatan Strategi	51
2.3.4. Perencanaan Strategis	52
2.3.5. Dasar Perencanaan Strategis	54
2.3.6. Metode Perencanaan Strategis	55
2.3.7. Proses Perencanaan Strategis	56
2.4. Kesimpulan	58
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1. Pengenalan	59
3.2. Metode	59
3.3. Objek Penelitian	60
3.4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	60
3.4.1. Sumber Data	60
3.4.2. Teknik Pengumpulan Data	61

3.5. Instrumen Penelitian	63
3.6. Teknik Analisis Data	65
3.7. Kesimpulan	69
BAB IV DATA DAN ANALISIS	71
4.1. Pengenalan	71
4.2. Industri Batik Kota Pekalongan	71
4.2.1. Kota Pekalongan	71
4.2.2. Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan	72
4.2.3. Kerajinan Batik	74
4.2.4. Sejarah Masuknya Batik di Pekalongan	76
4.2.5. Perkembangan Batik di Pekalongan	77
4.2.6. Kondisi Industri Batik di Pekalongan Saat Ini	82
a) Aspek Sumber Daya Manusia	88
b) Aspek Modal	88
c) Aspek Produksi	89
d) Aspek Pemasaran	91
4.3. Strategi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan untuk Mengembangkan Industri Batik	95
a) Strategi pada Aspek Sumber Daya Manusia	97
b) Strategi pada Aspek Modal	99
c) Strategi pada Aspek Produksi	100
d) Strategi pada Aspek Pemasaran	101

4.4. Pengaruh Kemajuan Industri Batik Kota Pekalongan terhadap Kemandirian Daerah Kota Pekalongan	106
4.5. Kesimpulan	117
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	118
5.1. Kesimpulan	118
5.2. Keterbatasan	120
5.3. Rekomendasi	120
DAFTAR PUSTAKA	122



DAFTAR TABEL

Tabel

4.1.	Realisasi Ekspor Perusahaan Kota Pekalongan Januari s.d November 2009	93
4.2.	Daftar IKM Produk Unggulan Kota Pekalongan (Tahun 2010 Semester I)	98
4.3.	Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010	108
4.4.	Rincian Realisasi Pajak Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010	109
4.5.	Rincian Realisasi Retribusi Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar

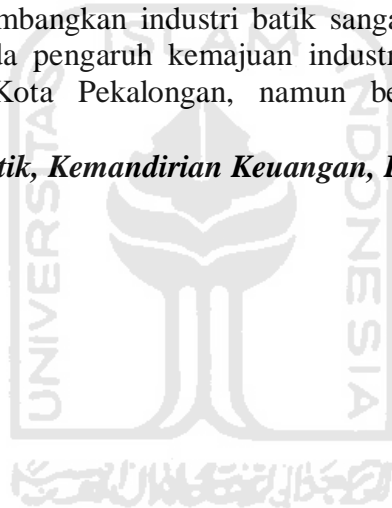
2.1.	Dasar Perencanaan Strategis	55
2.2.	Proses Perencanaan Strategis	57
4.1.	Grafik Perkembangan IKM Batik Pekalongan Periode Tahun 2007 s.d 2010	86



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam mengembangkan kemandirian keuangan Kota Pekalongan dari industri batik yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai kondisi industri batik Pekalongan saat ini, dan strategi-strategi yang dilakukan Pemkot Pekalongan untuk meningkatkan industri batik. Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana pengaruh kemajuan industri batik Pekalongan terhadap kemandirian keuangan Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan sampel Pemkot Pekalongan dan para pengusaha batik dengan menggunakan metode wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa industri batik Pekalongan saat ini telah maju dalam hal sarana dan prasarana, namun masih terdapat kelemahan dalam sektor SDM dan modal pengusaha batik kecil, dan produksi batik saat ini mengalami penurunan karena krisis bahan baku. Serta upaya dan strategi yang dilakukan Pemkot Pekalongan untuk mengembangkan industri batik sangat serius. Selain itu juga diketahui bahwa tidak ada pengaruh kemajuan industri batik terhadap tingkat kemandirian keuangan Kota Pekalongan, namun berpengaruh pada sektor pariwisata.

Kata Kunci : *Industri Batik, Kemandirian Keuangan, Pendapatan Asli Daerah, Manajemen Strategi*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tata kelola pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang *Pemerintahan Daerah* dan *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat daerah (Risky, 2010).

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat (Suparmoko, 2002). Menurut UU No.32 Tahun 2004 pasal 1 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimaksud mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali wewenang dalam bidang politik luar negeri,

pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan lainnya yang diatur oleh pemerintah pusat (Risky, 2010).

Pelaksanaan otonomi daerah secara resmi dimulai pada tahun 2001. Lahirnya otonomi daerah disambut dengan berbagai harapan dan kecemasan oleh segenap masyarakat di daerah. Sebagian masyarakat di daerah bermimpi bahwa otonomi daerah akan menjadikan masyarakat lebih makmur dan sejahtera. Namun, tidak sedikit pula daerah yang cemas karena mereka menyadari minimnya potensi dan sumber daya yang dimiliki (Risky, 2010).

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Risky, 2010).

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut

pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah (Halim, 2009).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit fiskal. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah (Risky, 2010).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Untuk itu diterbitkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti UU No.34 Tahun 2000, agar sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah dan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif (Risky, 2010).

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, ada 11 jenis pajak daerah yang dapat dipungut dengan tarif pajak maksimum, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Risky, 2010).

Suatu daerah otonom diharapkan mampu untuk mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya sendiri sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat memiliki porsi yang lebih kecil. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh tiap daerah otonom. PAD merupakan bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. PAD harus benar-benar digali untuk mengetahui kondisi riil daerah tersebut (Risky, 2010).

Jika nantinya struktur PAD sudah kuat, dapat dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat, sehingga dana perimbangan dari pusat yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta berbagai bentuk transfer lainnya yang bersumber dari pemerintah pusat hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dengan semakin kecil tingkat ketergantungan, daerah tersebut dapat dikatakan mandiri (Risky, 2010).

Penelitian yang dilakukan Dwiranda (2007) mengenai efektivitas dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Bali periode tahun 2002-2006 menjelaskan bahwa daerah otonom kabupaten/kota

di Bali dalam periode dua tahun terakhir masuk dalam kategori kemandirian keuangan yang sedang (rasio KKD lebih dari 50% sampai dengan 75%) dan rendah (rasio KKD lebih dari 25% sampai dengan 50%) masing-masing hanya satu kabupaten/kota, sedangkan sisanya (tujuh kabupaten) masuk kategori kemandirian keuangan yang sangat rendah (rasio KKD 1% sampai dengan 25%). Pada dua tahun awal, Kabupaten Badung masuk kategori kemandirian keuangan tinggi (rasio KKD lebih dari 75% sampai dengan 100%), tetapi menurun pada dua tahun terakhir.

Pada penelitian yang dilakukan Mujiwardhani (2008) yang mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Cilacap, menghasilkan kesimpulan bahwa kemampuan keuangan daerah Cilacap masih rendah baik pada masa sebelum maupun selama otonomi daerah. Itu berarti Kabupaten Cilacap belum mandiri terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah, dibuktikan dengan tingginya ketergantungan finansial terhadap pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Puspita (2009) yang mengambil lokasi di Daerah Surakarta menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah Surakarta masih relatif rendah karena pemerintah daerah masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah Surakarta memiliki kebutuhan fiskal yang besar. Hal ini terbukti dengan besarnya kebutuhan fiskal daerah dibandingkan dengan standar kebutuhan fiskal rata-rata se-Jawa Tengah baik untuk setiap tahunnya maupun secara rata-rata selama dua tahun anggaran (2006-2007). Pemerintah daerah Surakarta memiliki kapasitas fiskal lebih kecil dari kebutuhan fiskal. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah

Surakarta belum mampu memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya karena masih memerlukan subsidi dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan Purnomo (2009) mengenai Analisis Kemandirian dan Kinerja Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Kota Yogyakarta, Semarang dan Surakarta tahun 2001-2006 menyimpulkan bahwa pertumbuhan PAD yang terus meningkat pada Kota Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta akan berakibat pada penurunan bantuan pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran daerah masing-masing kota.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliana (2009) yang mengambil lokasi penelitian di Provinsi Sumatera Utara, menghasilkan kesimpulan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) mempunyai pengaruh signifikan yang positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan Raja Risky (2010) mengenai Analisis Kemandirian Keuangan Kabupaten Bintan periode tahun 2005-2009, menghasilkan kesimpulan bahwa Kabupaten Bintan masih belum mandiri terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Terlihat dari tingkat ketergantungan financial terhadap pemerintah pusat yang masih cukup tinggi.

Penelitian terdahulu meneliti tentang pengelolaan keuangan daerah yang berasal dari pendapatan daerah dalam mencapai kemandirian daerah, serta pengaruh dari pendapatan asli daerah tersebut terhadap tingkat

kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang strategi dalam industri batik dan hubungannya dengan kemandirian keuangan daerah. Sampel yang digunakan adalah Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.

Kota Pekalongan terletak di jalur pantai utara (pantura) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya, tepatnya 101 Km sebelah barat Semarang, atau 384 Km sebelah timur Jakarta. Sebagai kota kecil dengan luas keseluruhan hanya mencapai 45,25 Km², nama Pekalongan cukup terkenal di nusantara. Salah satu potensi daerah yang cukup besar di Kota Pekalongan adalah industri batik. Kota Pekalongan dikenal mendapat julukan *kota batik*, karena batik Pekalongan memiliki corak yang khas dan variatif. Sebagai kota batik, terdapat ratusan jumlah perusahaan/industri penghasil batik di Kota Pekalongan, yang terbagi menjadi tiga golongan skala, yaitu : industri kecil (nilai investasi dibawah 200 juta rupiah), industri menengah (nilai investasi lebih dari 200 juta rupiah, dibawah 5 milyar rupiah), dan industri besar (nilai investasi lebih dari 5 milyar rupiah).

Dengan besarnya potensi daerah yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang strategi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam meningkatkan industri batik, dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, dengan judul **“Industri Batik Dalam Kemandirian Keuangan Kota Pekalongan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagai kota dengan julukan *kota batik*, terdapat ratusan industri penghasil batik di Kota Pekalongan, yang menjadikan Kota Pekalongan terkenal sebagai penghasil batik terbesar di Indonesia. Bahkan kota besar seperti Solo dan Yogyakarta yang terkenal kental akan budaya batiknya pun mengandalkan industri batik Kota Pekalongan untuk memproduksi dan memasok batik di kedua kota besar tersebut. Dengan besarnya kerajinan batik yang dihasilkan, Kota Pekalongan mempunyai potensi menjadi daerah yang mandiri dan tidak tergantung pada subsidi dari pemerintah pusat. Untuk meneliti strategi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam meningkatkan industri batik tersebut, maka disimpulkan rumusan masalah penelitian ini diantaranya :

1) *Bagaimanakah kondisi industri batik di Kota Pekalongan saat ini?*

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, industri batik Kota Pekalongan mengalami kemajuan cukup pesat. Pada rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui gambaran kondisi pengusaha batik di Kota Pekalongan saat ini, misalkan omset penjualannya dibanding tahun-tahun sebelumnya, kemudian sektor permodalan untuk perkembangan usaha, serta sejauh mana kemampuan produksi para pengusaha batik di Kota Pekalongan.

Dari rumusan masalah diatas, peneliti dapat mengetahui kemajuan kondisi industri batik di Kota Pekalongan sekarang ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain bertambahnya

jumlah pengusaha batik, meningkatnya produksi batik secara keseluruhan per tahunnya, tersedianya sarana & prasarana seperti pasar batik, kampung batik, dan lain-lain yang bersifat mendukung kemajuan industri batik. Strategi dan upaya Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang menjadikan kondisi industri batik Kota Pekalongan sekarang ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan akan diulas pada rumusan masalah selanjutnya.

- 2) *Bagaimanakah strategi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan untuk meningkatkan produksi kerajinan batik?*

Pada rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui apa saja yang telah dilakukan atau pun yang masih direncanakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan untuk meningkatkan produksi kerajinan batik. Dengan terjawabnya rumusan masalah tersebut, peneliti dapat mengetahui secara mendalam strategi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dan instansi yang terkait, dalam mengembangkan industri batik.

- 3) *Bagaimanakah pengaruh kemajuan industri batik Kota Pekalongan terhadap kemandirian daerah Kota Pekalongan?*

Dari rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui apa saja keuntungan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dari penerapan strategi yang telah dilakukan dalam meningkatkan industri

batik. Apakah upaya yang telah dilakukan tersebut berimbas pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. Dari rumusan masalah tersebut, peneliti dapat mengetahui manfaat penerapan strategi yang telah dilakukan terhadap kemandirian daerah Kota Pekalongan.

1.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan penelitian pada strategi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan untuk mengembangkan industri batik dalam kurun waktu tahun 2000 s.d 2011.

1.4. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui kondisi industri batik di Kota Pekalongan.
- 2) Untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam meningkatkan industri batik.
- 3) Untuk mengetahui hubungan antara strategi yang telah dijalankan dengan kemandirian daerah Kota Pekalongan.

1.5. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan

Sebagai tambahan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam mengukur perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah dalam hubungannya dengan perkembangan kemandirian keuangan daerah dan sebagai dasar untuk penentuan kebijakan.

2) Bagi rekanan

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kemandirian keuangan suatu daerah.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini.

4) Bagi Universitas

Sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai kemandirian daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

1.6. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, akan dibahas tentang penelitian yang hendak dilakukan. Fungsi dari bab ini adalah untuk mengetahui isi dari penelitian ini. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teoritik

Pada bab ini, akan dibahas konsep-konsep teori yang melandasi penelitian. Fungsi dari bab ini adalah sebagai bahasan untuk teori-

teori tentang strategi. Teori-teori yang dijelaskan pada bab ini mencakup definisi, tipe strategi, tingkatan strategi, perencanaan strategis, dasar perencanaan strategi, metode perencanaan strategi, dan proses perencanaan strategis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini, menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian. Fungsi dari bab ini adalah sebagai bahasan tentang salah satu metode penelitian yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan membahas tentang metode, objek penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV Analisa Data dan Pembahasan

Pada bab ini, akan dibahas tentang hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti selama melakukan penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang Kota Pekalongan, kerajinan batik, kondisi industri batik di Kota Pekalongan saat ini, strategi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan untuk mengembangkan industri batik, serta pengaruh kemajuan industri batik Kota Pekalongan terhadap kemandirian daerah Kota Pekalongan.

BAB V Penutup

Pada bab ini, akan dibahas tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis data pada bab sebelumnya. Fungsi dari bab ini adalah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi Pemda Kota Pekalongan, serta sebagai bahasan bagi penelitian sejenis berikutnya. Dalam bab ini berisi kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian yang dilakukan, serta saran yang dikeluarkan dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1. Pengenalan

Pada bab ini, akan dibahas dasar-dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Fungsi dari bab ini adalah sebagai bahasan untuk teori-teori tentang kemandirian daerah dan manajemen strategi. Teori-teori kemandirian daerah yang dijelaskan pada bab ini mencakup teori penganggaran yang baik, penjelasan tentang anggaran pendapatan belanja daerah, teori tentang kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dan terakhir akan dijelaskan tentang peraturan pemerintah. Untuk teori selanjutnya yaitu teori manajemen strategi yang dijelaskan mencakup definisi strategi, dasar perencanaan strategis, metode perencanaan strategi, dan proses perencanaan strategis.

2.2. Teori Kemandirian Daerah

2.2.1. Teori Penganggaran Yang Baik

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai **instrumen kebijakan ekonomi** anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Penganggaran itu sendiri adalah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar

tertentu, yakni skala mata uang dan jumlah biaya dengan memperhatikan pengarahannya dan pembatasan yang berlaku terhadapnya (Risky, 2010).

Di Indonesia, sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional atau *item line budget*. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggungjawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Tolok ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja namun jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal (Risky, 2010).

Dalam perkembangannya, munculah sistematisasi anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan. Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas (Risky, 2010).

Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif (Risky, 2010).

Berbeda dengan penganggaran dengan pendekatan tradisional, penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Jadi, apabila kita menyusun anggaran dengan pendekatan kinerja, maka *mindset* kita harus fokus pada "apa yang ingin dicapai". Kalau fokus ke "output", berarti pemikiran tentang "tujuan" kegiatan harus sudah tercakup di setiap langkah ketika menyusun anggaran. Sistem ini menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa (Risky, 2010).

Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah *performance* atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang

tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) (Risky, 2010).

Siklus anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Siklus anggaran berbeda dengan tahun anggaran. Tahun anggaran adalah masa satu tahun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran atau waktu di mana anggaran tersebut dipertanggungjawabkan. Jelaslah, bahwa siklus anggaran bisa mencakup tahun anggaran atau melebihi tahun anggaran karena pada dasarnya, berakhirnya suatu siklus anggaran diakhiri dengan perhitungan anggaran yang disahkan oleh undang-undang. Siklus anggaran terdiri dari beberapa tahap (fase) yaitu (Risky, 2010):

1. Tahap penyusunan anggaran.
2. Tahap pengesahan anggaran.
3. Tahap pelaksanaan anggaran.
4. Tahap pengawasan pelaksanaan anggaran.
5. Tahap pengesahan perhitungan anggaran.

Untuk dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus disusun perencanaan strategi. Penyusunannya dilakukan secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan masyarakat. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja dan Standar Pelayanan Minimal yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja (tolok ukur) digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah (Risky, 2010).

Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa ABK. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peran Analisa Standar Biaya (ASB) sangat diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan (Risky, 2010).

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penganggaran yang baik itu memiliki kriteria sebagai berikut (Risky, 2010):

- 1) Transparansi dan akuntabilitas. APBN/APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Oleh karena itu, anggota masyarakat berhak mengetahui proses anggaran dalam menyalurkan aspirasi dan

kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

- 2) Disiplin anggaran. Pendapatan yang direncanakan harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya.
- 3) Keadilan anggaran. Pemerintah pusat/daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil tanpa diskriminasi sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat dalam pemberian pelayanan.
- 4) Efisiensi dan efektifitas anggaran. Setiap kegiatan yang direncanakan harus efektif dalam pencapaian kinerjanya dan efisien dalam pengalokasian dananya.
- 5) Disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran disusun dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sebanding atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan.

2.2.2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran daerah merupakan suatu alat yang memegang peran penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, dan di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah (Risky, 2010). Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (UU Keuangan Negara, 2002).

Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD memiliki beberapa fungsi, yaitu (Risky, 2010):

- 1) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengang-

guran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- 5) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 6) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Tujuan utama proses penyusunan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan *input* dan *output* dalam satuan keuangan dan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat. Struktur APBD sendiri merupakan satu kesatuan. Didalam terdapat klasifikasi dari penerimaan dan pengeluaran daerah selama 1 tahun (Risky, 2010).

2.2.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokan atas :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah atau dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah yang dirancang di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari PAD sendiri adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Risky, 2010).

UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain PAD yang sah (Risky, 2010).

a) Pajak Daerah

Menurut undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Risky, 2010).

Untuk mempertahankan prinsip tersebut diatas maka perpajakan daerah harus memiliki cirri-ciri sebagai berikut (Risky, 2010):

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya.
- b. Relative stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastic dan ada kalanya menurun secara tajam.
- c. Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Melihat definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Pajak daerah diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah. Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yakni : Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi dan Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota (Risky, 2010).

Adapun pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam UU No 18 tahun 1997 menyebutkan jenis-jenis pajak daerah yaitu (Risky, 2010):

1) Jenis pajak daerah tingkat I terdiri dari :

- Pajak kendaraan bermotor.
- Bea balik nama kendaraan bermotor.
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

2) Jenis pajak daerah tingkat II terdiri dari :

- Pajak hotel dan restaurant.
- Pajak hiburan.
- Pajak reklame.
- Pajak penerangan jalan.
- Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C.
- Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Tarif pajak tingkat 1 ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan penetapannya seragam diseluruh Indonesia. Sedangkan untuk pajak tingkat II ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang pajak daerah tidak dapat berlaku surut (Risky, 2010).

Sesuai dengan ketentuan UU No 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan terhadap UU No 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, telah diatur antara lain mengenai bagi hasil pajak dan relokasi pajak daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota. Menurut ketentuan UU No 34 tahun 2000, minimum 10% dari hasil penerimaan pajak kabupaten di alokasikan

untuk kepentingan desa. Pengaturan mengenai alokasi tersebut didasarkan pada aspek pemerataan dan potensi yang dimiliki oleh desa-desa yang bersangkutan (Risky, 2010).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Untuk itu diterbitkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, agar sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah dan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif (Risky, 2010).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, ada 11 jenis pajak daerah yang dapat dipungut dengan tariff pajak maksimum, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Risky, 2010).

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Prakoso, 2005). Retribusi daerah ini sendiri dapat dibagi dalam beberapa kelompok besar, yaitu (Risky, 2010):

- 1) Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan, seperti retribusi atas pelayanan kesehatan, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor dan lain-lain.
- 2) Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, seperti retribusi atas pemakaian kekayaan daerah, terminal, tempat pelelangan, tempat khusus parkir dan lain-lain.
- 3) Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan seperti retribusi atas izin mendirikan bangunan, izin trayek, izin gangguan dan lain-lain.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selain pajak dan retribusi, sumber pendapatan asli daerah adalah berasal dari bagian laba usaha daerah yang terdiri dari bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah. Undang-undang mengizinkan daerah untuk mendirikan perusahaan daerah (BUMD) yang nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi pembangunan (Risky, 2010).

Menurut UU No.33 tahun 2004, kontribusi tersebut dapat berupa deviden yang dibayarkan kepada daerah dan kontribusi BUMD kepada anggaran daerah atau juga dengan memanfaatkan kekayaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan daerah, yang dapat mendatangkan tambahan bagi penerimaan daerah (Risky, 2010).

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut UU No.33 tahun 2004, selain dari ketiga sumber yang telah diuraikan di atas, sumber PAD dapat pula berasal dari pendapatan lain-lain yang sah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar

rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah (Risky, 2010).

2. Dana Perimbangan

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Risky, 2010).

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan untuk meminimalisir kesenjangan fiskal antara daerah dan pusat. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus (Risky, 2010).

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam (Risky, 2010).

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas (Risky, 2010):

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 5 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari (Risky, 2010):

- Kehutanan.
- Pertambangan umum.
- Perikanan.
- Pertambangan minyak bumi.
- Pertambangan gas bumi.
- Pertambangan panas bumi.

b) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21). DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Risky, 2010).

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (Risky, 2010).

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal (CF)} + \text{AD (gaji PNS)}$$

Dimana :

AD : Gaji PNS Daerah

CF : Kebutuhan Fiskal (K_bF) – Kapasitas Fiskal (K_pF)

Komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari : jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Komponen variabel kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Risky, 2010).

Metode Perhitungan DAU (Risky, 2010):

1) Alokasi Dasar (AD)

Besaran Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

2) Celah Fiskal (CF)

Untuk mendapatkan alokasi berdasar celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara K_bF dengan K_pF , sebagai berikut :

Kebutuhan Fiskal (K_bF)

$$K_bF = TBR (a_1IP + a_2IW + a_3IKK + a_4IPM + a_5IPDRB)$$

TBR : Total Belanja Rata-rata APBD;

IP : Indeks Jumlah Penduduk;

IW : Indeks Luas Wilayah;

IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi;

IPM : Indeks Pembangunan Manusia;

PRDB/cap : Indeks PDRB per kapita

a : Bobot Indeks.

Kapasitas Fiskal (K_pF)

$$K_pF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA$$

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak : Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak

DBH SDA : Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber
Daya Alam

c) Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 23) khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Risky, 2010).

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD, kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah dan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis (Risky, 2010).

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup (Risky, 2010):

- a) Hibah, berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

- b) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- c) Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
- d) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- e) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2.2.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan (Risky, 2010).

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam

upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Risky, 2010).

2.2.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Tujuannya untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari (Risky, 2010):

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).
- 2) Pencairan dana cadangan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan.
- 4) Penerimaan pinjaman daerah.
- 5) Penerimaan kembali penerimaan pinjaman daerah.
- 6) Penerimaan piutang daerah.

2.2.3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi membahas sumber daya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya. SDM juga merupakan salah satu faktor penentu kemandirian suatu daerah. Potensi manusia menyangkut dua aspek yaitu aspek kualitas dan kuantitas (Risky, 2010).

Karakteristik demografi merupakan aspek kuantitatif sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menggambarkan jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk dan komposisi penduduk. Sedangkan yang berhubungan dengan kualitas (mutu) sumber daya manusia adalah karakteristik sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara, sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada baik secara fisik maupun mental (Risky, 2010).

2.2.3.1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia yaitu tingkat kemampuan penduduk dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraannya. Mutu sumber daya manusia pada suatu negara

dapat dilihat dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatannya (Risky, 2010).

1. Tingkat Pendapatan per Kapita

Untuk melihat tingkat pendapatan biasanya diukur dari besarnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yaitu pendapatan yang diperoleh rata-rata tiap penduduk selama satu tahun. Pendapatan itu dihitung dari pendapatan nasional secara keseluruhan dibagi dengan jumlah penduduk (Risky, 2010).

Tinggi rendahnya pendapatan per kapita penduduk tergantung kepada jumlah penduduk. Beberapa kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan pendapatan per kapita yaitu (Risky, 2010):

- Jika GNP dari jumlah penduduk tetap naik maka pendapatan per kapita akan turun.
- Jika GNP tetap, maka pendapatan perkapita akan berkurang.
- Jika GNP bertambah, maka pendapatan per kapita akan berubah sesuai dengan perubahan jumlah penduduk.

2. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidang pendidikan merupakan kunci utama kemajuan sebab melalui jalur pendidikan dapat mempercepat proses alih teknologi dari negara maju dan juga

mendorong penemuan teknologi baru. Tingkat pendidikan penduduk yang tinggi memungkinkan penduduk dapat mengolah sumber daya alam dengan baik sehingga kesejahteraan penduduk dapat segera diwujudkan (Risky, 2010).

Tapi tingkat pendidikan di Indonesia masih sangat rendah, walaupun mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah telah mengambil beberapa upaya dalam memperluas dan meratakan kesempatan memperoleh pendidikan, diantaranya dengan jalan (Risky, 2010):

- a) Menggalakkan program wajib belajar 9 tahun.
- b) Mendorong kesadaran masyarakat yang mampu atau badan-badan usaha untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak kurang mampu.
- c) Menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi, khususnya bagi siswa berprestasi yang kurang mampu.
- d) Membuka jalur-jalur pendidikan alternatif atau nonformal (seperti kursus-kursus keterampilan) sehingga dapat memperkaya kemampuan atau kualitas seseorang.
- e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar mengajar hingga ke pelosok daerah.

3. Tingkat Kesehatan Penduduk

Produktivitas seseorang sangat ditentukan oleh tingkat kesehatannya. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian, terutama kematian bayi dan ibu saat melahirkan. Kesehatan juga berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan. Apabila salah satu kebutuhan tidak terpenuhi maka dapat terganggu kesehatannya. Rendahnya kualitas kesehatan penduduk umumnya disebabkan oleh (Risky, 2010):

- Lingkungan tidak sehat.
- Gizi makanan yang rendah.
- Adanya penyakit-penyakit menular.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakatnya ditempuh melalui langkah-langkah, berikut ini (Risky, 2010):

- a) Menjalin kerja sama dengan badan kesehatan dunia (WHO) dalam mengadakan program kesehatan, misalnya pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional, standarisasi obat dan makanan, serta peningkatan gizi masyarakat.
- b) Melaksanakan program peningkatan kualitas lingkungan, baik dengan kemampuan sendiri ataupun melalui kerja sama dengan luar negeri (misalnya dengan menjalin kerja sama dengan badan pembangunan dunia/UNDP). Salah satu contoh program

peningkatan kualitas lingkungan yang telah dan masih dilakukan adalah Kampong Improvement Programme (KIP).

- c) Menggiatkan program pemerataan kesehatan dengan cara melengkapi sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi tenaga medis, obat-obatan, dan alat-alat penunjang medis lainnya hingga ke pelosok desa.
- d) Menghimbau penggunaan dan penyediaan obat-obat generik bermutu sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- e) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, misalnya melalui program asuransi kesehatan keluarga miskin (Askeskin) untuk keluarga miskin (prasejahtera).

2.2.3.2. Kuantitas Sumber Daya Manusia

Kuantitas sumber daya manusia atau identik dengan jumlah penduduk. kuantitas sumber daya manusia pada suatu negara dapat dilihat dari jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan persebaran/kepadatan penduduknya (Risky, 2010).

1. Jumlah Penduduk

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar, maka tidak heran jika Indonesia dianggap sebagai pasar yang menjanjikan bagi kalangan dunia usaha. Sebenarnya, jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal

dasar pembangunan. Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi jika sumber daya manusia yang ada merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut jumlahnya terbatas, maka banyaknya jumlah penduduk merupakan kendala dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat ketergantungan dari manusia yang tidak produktif terhadap manusia yang produktif (Risky, 2010).

Saat ini, besarnya jumlah penduduk Indonesia menempati urutan pertama di antara negara-negara ASEAN, menempati urutan ke tiga di Benua Asia setelah RRC dan India, serta menempati urutan ke empat dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Kenaikan jumlah penduduk di tiap negara tersebut secara otomatis memengaruhi banyaknya jumlah penduduk dunia. Kondisi ini merupakan bentuk dinamika penduduk dunia (Risky, 2010).

Jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak dari tahun ke tahun tentunya menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi Indonesia. Beberapa dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari banyaknya jumlah penduduk, antara lain (Risky, 2010):

- Meningkatnya kebutuhan akan berbagai fasilitas sosial.
- Meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja.

- Meningkatnya angka pengangguran (bagi mereka yang tidak mampu bersaing).
- Meningkatnya angka kriminalitas.

Berikut ini beberapa kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi masalah jumlah penduduk (Risky, 2010):

- Menganangkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional, dengan cara memperkenalkan tujuan-tujuan program KB melalui jalur pendidikan, mengenalkan alat-alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan menepis anggapan yang salah tentang anak.
- Menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah.
- Membatasi pemberian tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil/ABRI hanya sampai anak kedua.

2. Pertumbuhan Penduduk

Seperti halnya negara-negara berkembang pada umumnya, negara kita senantiasa mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Hal ini berarti Indonesia mengalami laju pertumbuhan penduduk. Namun, jika diperhatikan, laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan (Risky, 2010).

Permasalahan kependudukan yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk memiliki kesamaan dengan permasalahan yang ditimbulkan dari banyaknya jumlah penduduk. Adapun usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk antara lain (Risky, 2010):

- Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam menjadi akseptor Keluarga Berencana.
- Mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat dihambat.
- Meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat, dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

3. Persebaran/Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk ekonomi adalah besarnya jumlah penduduk pada suatu wilayah didasarkan atas kemampuan wilayah yang bersangkutan. Kepadatan penduduk di tiap wilayah Indonesia tidaklah sama, hal ini tentu saja menimbulkan permasalahan kependudukan. Permasalahan ini terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana sosial, kesempatan kerja, stabilitas keamanan, serta pemerataan pembangunan (Risky, 2010).

Pemusatan penduduk pada daerah tertentu (terutama di kawasan perkotaan dan pusat-pusat kegiatan) akan menimbulkan berbagai permasalahan kependudukan, antara lain (Risky, 2010):

- Munculnya kawasan-kawasan kumuh kota dengan rumah-rumah yang tidak layak huni.
- Sulitnya persaingan di dunia kerja, sehingga menyebabkan merebaknya sektor-sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pengamen, dan sebagainya yang terkadang keberadaannya dapat mengganggu ketertiban.
- Turunnya kualitas lingkungan dan terganggunya stabilitas keamanan.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak ketidakmerataan penduduk meliputi hal-hal berikut ini (Risky, 2010):

- Melaksanakan program transmigrasi.
- Melaksanakan program pemerataan pembangunan dengan cara mendistribusikan perusahaan atau industri di pinggir kota (dekat kawasan pedesaan) di pulau-pulau selain Pulau Jawa.
- Melengkapi sarana dan prasarana sosial masyarakat hingga ke pelosok desa, sehingga pelayanan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat desa dapat dipenuhi sendiri dan dapat mencegah atau mengurangi arus urbanisasi.

2.2.4. Peraturan Pemerintah

Sejak tanggal 1 Januari 2001 telah terjadi perubahan dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut terutama terkait dengan dilaksanakannya secara efektif otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 dengan penyempurnaan Nomor 32 Tahun 2004 dan telah disempurnakan kembali atau penyempurnaan kedua di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Risky, 2010).

Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu juga dilaksanakan pula dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah (Risky, 2010).

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar

sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan nasional (Risky, 2010).

Menurut Mardiasmo (2002), penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat (1) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (3) membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Risky, 2010).

Sedangkan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah mengalami penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Sedangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab (Risky, 2010).

Pengelolaan keuangan daerah harus Transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam artii bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Risky, 2010).

Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung-jawab (Risky, 2010).

2.3. Teori Manajemen Strategi

2.3.1. Strategi

Kata “strategi” adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *stratēgos*. Adapun kata *stratēgos* dapat diterjemahkan sebagai ‘komandan militer’ pada zaman demokrasi Athena (Wikipedia, 2011c). Ada beberapa pengertian dari strategi, antara lain :

1. Wikipedia: Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu (Wikipedia, 2011c).

2. Chandler (1962): Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya (Resmiadi, 2010).
3. Porter (1985): Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing (Resmiadi, 2010).
4. Learned, Christensen, Andrews, dan Guth (1965): Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing (Resmiadi, 2010).
5. Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steiner dan Miner (1977): Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi (Resmiadi, 2010).
6. Andrews (1980), Chaffe (1985): Strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders, seperti stakeholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan (Resmiadi, 2010).
7. Hamel dan Prahalad (1995): Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan (Resmiadi, 2010).

Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif (Wikipedia, 2011c). Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampurkan kedua kata tersebut (Wikipedia, 2011c).

2.3.2. Tipe Strategi

Jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut (Resmiadi, 2010):

1. Strategi Integrasi

- Integrasi ke depan, yakni memperoleh kepemilikan atau mengendalikan distributor atau pengecer.
- Integrasi ke belakang, yakni memperoleh kepemilikan atau mengendalikan supplier atau pemasok.
- Integrasi horizontal, yakni memperoleh kepemilikan atau mengendalikan para pesaing.

2. Strategi Intensif

- Penetrasi pasar, yakni mencari pangsa pasar yang lebih besar untuk produk atau jasa yang sudah ada sekarang lewat usaha pemasaran yang lebih gencar.

- Pengembangan produk, yakni mencari kenaikan penjualan dengan memperbaiki produk atau jasa yang sudah ada atau mengembangkan yang baru.
- Pengembangan pasar, yakni memperkenalkan produk atau jasa yang sudah ada ke wilayah geografi baru.

3. Strategi Diversifikasi

- Diversifikasi Konsentrik, yakni menambah produk atau jasa baru tetapi berkaitan.
- Diversifikasi Konglomerat, yakni menambah produk atau jasa baru tetapi tidak berkaitan.
- Diversifikasi Horizontal, yakni menambah produk atau jasa baru tetapi tidak berkaitan untuk pelanggan yang sudah ada.

4. Strategi Defensif

- Usaha patungan, yakni dua perusahaan atau lebih membentuk kemitraan atau konsorsium sementara dengan tujuan kapitalisasi atau beberapa peluang.
- Penciutan/penghematan, yakni mengubah pengelompokan lewat penghematan biaya dan aset untuk membalik penjualan dan laba yang menurun.
- Divestasi, yakni menjual suatu divisi atau bagian dari suatu organisasi.

- Likuidasi, yakni menjual semua aset perusahaan, bagian per bagian, atau nilai aset berwujud.

2.3.3. Tingkatan Strategi

Menurut Higgins (1985), ada 4 (empat) tingkatan strategi yang keseluruhannya disebut Master Strategy, yaitu :

1. *Enterprise Strategy*

Berkaitan dengan respon masyarakat. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi.

2. *Corporate Strategy*

Berkaitan dengan misi organisasi, sehingga disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi.

3. *Business Strategy*

Menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat, dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan strategik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

4. *Functional Strategy*

Merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lainnya. Ada 3 (tiga) jenis strategi fungsional, yaitu :

- a) Strategi Fungsional Ekonomi, yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai suatu kesatuan ekonomi yang sehat antara lain berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penulisan dan pengembangan.
- b) Strategi Fungsional Manajemen, mencakup *planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing, dan integrating.*

Strategi Isu Strategik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah.

2.3.4. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini (Wikipedia, 2011c). Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang

dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-sampai 10 tahun kedepan (Wikipedia, 2011c).

Menurut Tjokroamidjojo (1992, hal. 14) terdapat 5 (lima) hal pokok yang perlu diketahui dalam perencanaan, yakni (Rahmaddin, 2009):

1. Permasalahan-permasalahan pembangunan suatu negara/masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan, dalam hal ini sumber-sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya.
2. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.
3. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya dan pemilihan alternatif-alternatifnya yang terbaik.
4. Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha yang konkrit.
5. Jangka waktu pencapaian tujuan.

Perencanaan strategis mempunyai beberapa tujuan dalam pelaksanaannya, antara lain (Wulandari, 2010):

1. Mengukur dan memanfaatkan kesempatan/peluang sehingga mampu mencapai keberhasilan.
2. Membantu meringankan beban manajer dalam tugasnya menyusun dan mengimplementasikan manajemen strategi.
3. Agar lebih terorganisasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan.

4. Sebagai landasan untuk memonitor perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga dapat dilakukan penyesuaian.

Sebagai cermin atau evaluasi perencanaan selanjutnya sehingga bisa menjadi bahan penyempurnaan perencanaan strategi yang akan datang (Wulandari, 2010).

2.3.5. Dasar Perencanaan Strategis

Ada 2 (dua) dasar perencanaan strategi, yaitu (Wulandari, 2010):

1. Perencanaan Intuitif Antisipatif

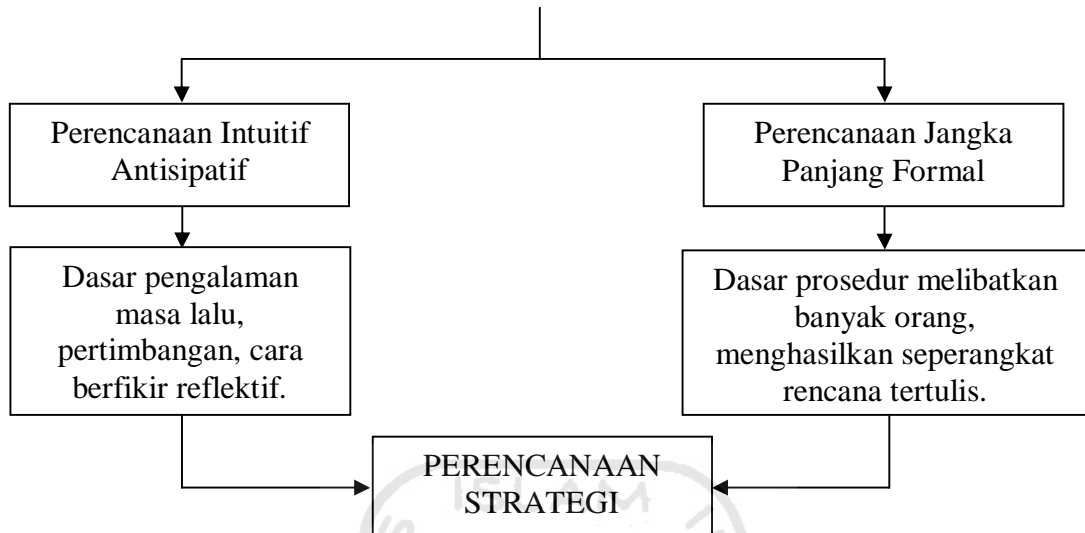
Perencanaan yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman, naluri, pertimbangan, dan reflektif seorang manajer. Dengan kata lain, perencanaan Intuitif Antisipatif adalah perencanaan pengalaman berdasarkan masa lalu, pertimbangan dan cara berfikir reflektif.

2. Perencanaan Jangka Panjang Formal

Perencanaan berdasarkan prosedur penelitian, melibatkan banyak orang dan menghasilkan seperangkat rencana tertulis.

Secara visual, perencanaan strategi tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1. Dasar Perencanaan Strategis



Sumber : (Wulandari, 2010)

2.3.6. Metode Perencanaan Strategis

Ada 5 (lima) metode dasar dalam perencanaan strategi secara formal, yaitu (Wulandari, 2010):

1. Konsultan
2. Top-Down (Dari Atas ke Bawah)

Perencanaan dilakukan pada tingkat atas perusahaan, sedangkan bagian-bagian atau departemen-departemen hanya membuat rencana-rencana yang jangkauannya sangat terbatas.

3. Bottom-Up (Dari Bawah ke Atas)

Manajemen puncak meminta saran pada bagian-bagian atau divisi-divisi atau departemen-departemen, yaitu berupa rencana-rencana yang perlu diajukan. Namun manajer puncak tetap yang akan memutuskan.

4. Kombinasi Antara Top-Down dan Bottom-Up

Manajer puncak dan kepala divisi atau bagian berdialog secara bersama-sama dalam menyusun rencana, bahkan melibatkan para staf.

5. Team Planning (Perencanaan Tim)

Direktur utama dan dibantu oleh para manajernya, atau membentuk suatu team untuk membuat dan mengembangkan rencana formal.

2.3.7. Proses Perencanaan Strategis

Proses perencanaan strategis adalah analisis situasi, dengan maksud untuk menghimpun unsur-unsur yang termasuk ke dalam kelompok pengenalan situasi, yaitu (Wulandari, 2010):

1. Harapan Masyarakat

Yang termasuk di dalam harapan masyarakat yaitu :

- a) Harapan pemegang saham.
- b) Harapan pelanggan.
- c) Harapan pemasok.
- d) Harapan kreditur.
- e) Komunitas.

2. Harapan Perusahaan

Yang termasuk di dalam harapan perusahaan adalah :

- a) Harapan manajemen puncak.
- b) Harapan manajemen lain.

- c) Harapan karyawan.
3. Data Dasar
- Ada 3 (tiga) data dasar, yaitu :
- a) Prestasi masa lalu.
- b) Situasi saat ini.
- c) Peramalan.
4. Analisa SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*)

Analisis SWOT didahului dengan identifikasi posisi organisasi melalui evaluasi faktor internal dan eksternal untuk memilih alternatif strategi perusahaan (Resmiadi, 2010).

Secara visual dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2. Proses Perencanaan Strategis



Sumber : (Wulandari, 2010)

2.4. Kesimpulan

Dasar-dasar teori di atas peneliti peroleh dari telaah pustaka yang mempunyai kesimpulan tentang pengertian dari masing-masing logika teoritik, yaitu teori kemandirian daerah dan teori manajemen strategi. Teori-teori tentang kemandirian daerah mencakup teori penganggaran, APBD, kualitas dan kuantitas SDM, dan beberapa peraturan pemerintah. Dalam teori-teori tersebut dijelaskan pentingnya anggaran sebagai wujud pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan, fungsi APBD sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas dan kuantitas SDM yang merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan, serta beberapa peraturan pemerintah yang berisi tentang ketetapan otonomi daerah.

Yang termasuk dalam teori manajemen strategi antara lain definisi strategi, tipe-tipe dan tingkatan strategi, perencanaan strategis, dasar dan metode perencanaan strategis, serta proses perencanaan strategis. Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Pemilihan tipe dan tingkatan strategi yang tepat sangat menentukan keberhasilan dalam penerapan strategi yang sesuai, dan untuk menentukan tipe dan tingkatan strategi yang tepat diperlukan perencanaan strategis yang melewati beberapa tahap dan mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan strategi yang paling cocok untuk dilakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pengenalan

Pada bab ini, akan dibahas tentang metode penelitian yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian. Fungsi dari bab ini adalah sebagai bahasan tentang salah satu metode penelitian yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan membahas tentang metode, objek penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

3.2. Metode

Untuk menemukan unsur-unsur pokok yang harus dijawab sesuai dengan rumusan masalah, maka digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1988, hal. 5). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, lebih dapat dipercaya dan bermakna sehingga tujuan penelitian tercapai. Penggunaan pendekatan kualitatif ini, bukan karena pendekatan ini baru, lebih *trendy*, tetapi memang permasalahan yang didapat lebih cepat dicarikan jawabannya (Sugiyono, 2009).

3.3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dan para pengusaha batik di Kota Pekalongan. Penelitian ini merupakan studi kasus pada perajin batik di Kota Pekalongan dan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

3.4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Sumber Data

Dilihat dari asal sumber, data penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian (Hadi, 2009). Menurut Lsyandra bahwa data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara langsung kepada para pengusaha batik di Kota Pekalongan, kepada Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kota Pekalongan, dan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pekalongan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian (Hadi, 2009). Menurut Sekaran (2000), data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, misalnya dari jurnal, arsip perusahaan, atau publikasi lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen dari website antara lain dari website Disperindagkop Kota Pekalongan, website surat kabar Antara Jateng, serta beberapa website lain dan blog yang berisikan keterangan yang menambah pengetahuan peneliti terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2009).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan pengumpulan data dengan dokumen.

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono,

2009). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2009). Secara prakteknya, peneliti melakukan wawancara kepada para pengusaha batik di Kota Pekalongan, Bidang Perindustrian Disperindagkop Kota Pekalongan, dan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi DPPKAD Kota Pekalongan untuk mendapatkan data sebenarnya yang ada di lapangan.

2. Pengumpulan Data dengan Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009). Dalam prakteknya, peneliti mengumpulkan berbagai dokumen dari :

- 1) Bidang Perindustrian Disperindagkop Kota Pekalongan, berupa :
 - Data Perkembangan IKM Batik periode Tahun 2007 s.d 2010.
 - Data Realisasi Ekspor Perusahaan Kota Pekalongan Januari s.d November 2009.

- Data IKM Produk Unggulan Kota Pekalongan (Tahun 2010 Semester I).
- 2) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi DPPKAD Kota Pekalongan, berupa :
 - Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2010.
 - Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010.
- 3) Website resmi Disperindagkop Kota Pekalongan, dan
- 4) Beberapa website dan blog yang menyediakan informasi yang dapat menambah pengetahuan peneliti tentang permasalahan yang sedang diteliti.

3.5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, dan hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Selain itu dalam memandang realitas, penelitian kualitatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik (menyeluruh), dinamis, tidak dapat dipisah-pisahkan ke dalam variabel-variabel penelitian (Sugiyono, 2009, hal. 60). Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif *“the researcher is the key instrument”*, jadi peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009).

Sebagai instrumen kunci, keterlibatan peneliti lebih memungkinkan untuk menemukan makna dan tafsiran dari subjek penelitian dibandingkan dengan penggunaan alat *non human* seperti instrumen angket, test, wawancara terstruktur (Muhajir, 2003). Posisi peneliti dalam melakukan penelitian harus sebagai pencari data untuk memperoleh data bukan sebagai pengarah sumber data berdasarkan apa yang dipikirkan, tetapi bersifat apa adanya sesuai dengan yang terjadi di lapangan, yang dirasakan, dan dialami oleh peneliti (Patton, 1991).

Selanjutnya Nasution (1988) menyatakan dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen utama penelitian. Alasannya adalah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya (Sugiyono, 2009, hal. 60). Sehingga dapat disimpulkan bahwa peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan logika dan wawasan peneliti itu sendiri dari membaca, belajar dan informasi yang diperoleh saat pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang dapat mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan (Sugiyono, 2009). Maka yang dilakukan peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dari literatur, artikel, maupun wawancara, yang selanjutnya informasi tersebut

dipahami menggunakan logika dan wawasan peneliti sendiri, untuk kemudian membuat penjelasan dari data yang telah dianalisis dan membuat kesimpulan serta saran dari penelitian yang telah dilakukan.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis (Sugiyono, 2009).

Miles and Huberman (1984), menyatakan bahwa yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik (Sugiyono, 2009). Selanjutnya Susan Stainback menyatakan, belum ada panduan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan berapa banyak data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan atau teori (Sugiyono, 2009).

Selanjutnya Nasution menyatakan bahwa, melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang

dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda (Sugiyono, 2009).

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2009).

Spradley (1980), menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola (Sugiyono, 2009).

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikemukakan disini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan, analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang *grounded* (Sugiyono, 2009).

Miles and Huberman (1984), mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2009).

Menurut Spradley, teknik analisis data disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian. Pada tahap penjelajahan, dilakukan dengan teknik pengumpulan data *grand tour question*, analisis data dilakukan dengan analisis domain. Pada tahap menentukan fokus analisis data, dilakukan dengan analisis taksonomi. Pada tahap seleksi untuk analisis data, dilakukan dengan komponensial (Sugiyono, 2009).

Menurut Strauss dan Corbin (2003), penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya, dipilihnya

penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Menurut Agus Salim (2006), penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial. Metodologi penelitian yang dipakai adalah multi metodologi, sehingga sebenarnya tidak ada metodologi yang khusus. Para periset kualitatif dapat menggunakan semiotika, narasi, isi, diskursus, arsip, analisis fonemik, bahkan statistik.

Di sisi yang lain, para periset kualitatif juga menggunakan pendekatan, metode dan teknik-teknik etnometodologi, fenomenologi, hermeneutic, feminisme, rhizomatik, dekonstruksionisme, etnografi, wawancara, psikoanalisis, studi budaya, penelitian survei, dan pengamatan terlibat (*participant observation*). Menurut Bogdan dan Taylor (1975), mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002).

Dengan memperhatikan teori tentang teknik analisis data di atas, selanjutnya dalam prakteknya peneliti melakukan analisis sebanyak 3 (tiga kali). Analisis yang pertama dilakukan sebelum dilapangan. Peneliti melakukan analisis terlebih dahulu terhadap studi pendahuluan dan data sekunder untuk menentukan fokus penelitian. Selanjutnya analisis dilakukan selama di lapangan. Peneliti melakukan analisis pada saat pengumpulan data yang berupa dokumen dan wawancara dari Disperindagkop Kota Pekalongan,

dokumen dan wawancara dari DPPKAD Kota Pekalongan, wawancara pada beberapa pengusaha batik, serta dokumen pendukung berupa artikel-artikel dari website resmi Disperindagkop, dari website surat kabar, serta beberapa website dan blog yang menyediakan informasi yang dapat menambah pengetahuan peneliti tentang fokus penelitian.

Pada saat wawancara dengan kepala Bidang Perindustrian Disperindagkop, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi DPPKAD, dan dengan pengurus Kampung Batik Kauman, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.

Analisis yang terakhir dilakukan setelah selesai di lapangan. Data-data yang sudah terkumpul dan dianalisis tersebut kemudian dijelaskan dan dinarasikan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian yang kemudian menghasilkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

3.7. Kesimpulan

Pada bab ini, peneliti melakukan penelitiannya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan digunakannya pendekatan kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, dan dapat dipercaya sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, serta jawaban atas permasalahan lebih tepat.

Sumber data dan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara, studi pustaka, dan teknik analisa dokumen. Selain itu juga dalam penelitian kualitatif ini, peneliti merupakan instrumen kunci (*the researcher is the key instrumen*) (Sugiyono, 2009). Selanjutnya, pada bab IV peneliti akan membahas tentang analisa dari ketiga rumusan masalah.



BAB IV

DATA DAN ANALISIS

4.1. Pengenalan

Pada bab ini, akan dibahas tentang hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti selama melakukan penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang Kota Pekalongan, kerajinan batik, kondisi industri batik di Kota Pekalongan saat ini, strategi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan untuk mengembangkan industri batik, serta pengaruh kemajuan industri batik Kota Pekalongan terhadap kemandirian daerah Kota Pekalongan.

4.2. Industri Batik Kota Pekalongan

4.2.1. Kota Pekalongan

Kota Pekalongan adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, terletak di jalur pantura (pantai utara) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya, tepatnya 101 Km sebelah barat Semarang, atau 384 Km sebelah timur Jakarta (Wikipedia, 2011b). Batas wilayah administrasi Kota Pekalongan yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batang, serta di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan. Kota Pekalongan terbagi atas 4 kecamatan, yang terbagi lagi menjadi 47 kelurahan dengan luas keseluruhan mencapai 45,25 Km² (Wikipedia, 2011b).

Dalam hal pendapatan daerah, keuangan daerah Kota Pekalongan untuk saat ini masih bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Kota Pekalongan belum dapat mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Kota Pekalongan sendiri merupakan kota kecil yang mempunyai beberapa sumber daya daerah yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota tersebut. Untuk dapat menjadi mandiri, maka yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah memaksimalkan pendapatan dari sumber daya daerah yang ada guna memperkuat keuangan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.

4.2.2. Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah yang dirancang di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan diperoleh berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Daerah sendiri merupakan pendapatan secara keseluruhan yang didapat dari tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Komponen-komponen pendapatan yang termasuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah sendiri terbagi ke dalam 4 (empat) komponen pendapatan, yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,

serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Pemda Kota Pekalongan, 2010g).

Kota Pekalongan mempunyai potensi untuk menjadi kota yang mandiri dalam hal keuangan daerahnya. Hal ini karena Kota Pekalongan memiliki banyak sumber daya daerah yang dapat dimaksimalkan untuk menguatkan keuangan daerah, salah satu diantaranya adalah inudstri batik. Batik merupakan salah satu kerajinan tradisional yang sangat khas dan identik dengan Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan sendiri terkenal sebagai Kota Batik. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan Didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8). Kata BATIK dalam sesanti sendiri adalah sebuah singkatan dari Bersih, Aman, Tertib, Indah dan Komunikatif.

Selain itu, batik memang menjadi produk unggulan dari Pekalongan, karena sejak dahulu sudah terdapat ratusan industri penghasil batik dan batik sudah menjadi pekerjaan utama masyarakat Pekalongan. Dengan kondisi tersebut wajar jika Pekalongan mendapatkan julukan sebagai Kota Batik. Catatan lain, data tahun 2010 semester pertama menunjukkan terdapat 631 perusahaan industri batik dengan jumlah tenaga kerja mencapai 9.944 orang, dan diperkirakan akan

meningkat setidaknya 5-10% pada semester pertama tahun 2011 (Pemda Kota Pekalongan, 2010a).

4.2.3. Kerajinan Batik

Kata “batik” berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa yakni “amba” yang bermakna menulis, dan “titik”. Dijelaskan dalam Wikipedia Indonesia, batik adalah salah satu cara pembuatan bahan pakaian. Selain itu batik bisa mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain. Dalam literatur internasional, teknik ini dikenal sebagai *wax-resist-dyeing*. Pengertian kedua adalah kain atau busana yang dibuat dengan teknik tersebut, termasuk penggunaan motif-motif tertentu yang memiliki kekhasan (Wikipedia, 2011a).

Dahulu sebelum bahan pewarna kimia ditemukan, bahan pewarna yang dipakai terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari: pohon mengkudu, kayu tinggi, sogu, nila, dan bahan sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanah lumpur, sedangkan bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri (Mepow Blog, 2009). Kain batik itu sendiri digunakan untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dahulu.

Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam kraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh

karena banyak dari pengikut raja yang tinggal di luar kraton, maka kesenian batik ini dibawa mereka ke luar kraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing. Dalam perkembangannya, lambat laun kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang. Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga istana, kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari, baik wanita maupun pria (Aurino, 2007).

Sejarah pembatikan di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa Kerajaan Mataram, kemudian pada masa Kerajaan Solo dan Yogyakarta. Jadi kesenian batik ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit dan terus berkembang pada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Sedangkan kaitan antara perkembangan batik di Indonesia dengan penyebaran ajaran Islam, yaitu batik pada masa itu digunakan oleh tokoh-tokoh penyebar agama Islam yang juga pedagang sebagai alat perjuangan ekonomi selain menyebarkan agama Islam (Aurino, 2007).

Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai

awal abad ke-20 dan batik cap dikenal baru setelah Perang Dunia I selesai atau sekitar tahun 1920 (Warta Warga, 2010).

4.2.4. Sejarah Masuknya Batik di Pekalongan

Meskipun tidak ada catatan resmi kapan batik mulai dikenal di Pekalongan, namun menurut perkiraan batik sudah ada di Pekalongan sekitar tahun 1800. Menurut data yang tercatat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) Kota Pekalongan, motif batik ada yang dibuat tahun 1802, seperti motif pohon kecil berupa bahan baju (Mepow Blog, 2009). Namun perkembangan yang signifikan diperkirakan terjadi setelah perang besar pada tahun 1825-1830 di Kerajaan Mataram yang sering disebut dengan perang Jawa. Dengan terjadinya peperangan ini, keluarga keraton serta para pengikutnya banyak yang meninggalkan daerah kerajaan. Mereka tersebar ke arah timur dan barat. Kemudian di daerah-daerah baru itu para keluarga dan pengikutnya mengembangkan batik (Putra, 2009).

Dengan adanya migrasi ini, maka batik Pekalongan yang telah ada sebelumnya menjadi berkembang. Seiring berjalannya waktu, batik Pekalongan mengalami perkembangan pesat dibandingkan dengan daerah lain. Di daerah ini, batik berkembang di sekitar daerah pantai, yaitu di daerah Pekalongan kota dan daerah Buaran, Pekajangan, serta Wonopringgo (Putra, 2009).

4.2.5. Perkembangan Batik di Pekalongan

Pada masa lalu, pola kerja tukang batik masih sangat dipengaruhi siklus pertanian. Saat berlangsung masa tanam atau masa panen padi, mereka sepenuhnya bekerja di sawah. Dan diantara masa tanam dan masa panen itulah, mereka bekerja sepenuhnya sebagai tukang batik. Namun zaman telah berubah. Pekerja batik di Pekalongan kini tidak lagi didominasi para petani. Mereka kebanyakan berasal dari kalangan muda setempat yang ingin mencari nafkah. Hidup mereka sepenuhnya bergantung pada pekerjaan membatik (Warta Warga, 2010).

Perjumpaan masyarakat Pekalongan dengan berbagai bangsa seperti China, Arab, India, Melayu, Belanda dan Jepang pada zaman lampau telah mewarnai dinamika pada motif dan tata warna seni batik. Sehubungan dengan itu beberapa jenis motif batik hasil pengaruh dari berbagai negara tersebut yang kemudian dikenal sebagai identitas batik Pekalongan. Motif itu yaitu, batik Jlamprang, akulturasi dari negeri India dan Arab. Lalu batik Encim dan Klengenan, dipengaruhi oleh keturunan etnis China. Batik Belanda, batik Pagi Sore, dan batik Hokokai, tumbuh pesat sejak pendudukan Jepang. Perkembangan batik di Pekalongan memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh negara-negara itu. Ini memperlihatkan konteks kelenturan batik dari masa ke masa (Mepow Blog, 2009).

Batik pekalongan menjadi sangat khas karena bertopang sepenuhnya pada ratusan pengusaha kecil, bukan pada segelintir

pengusaha bermodal besar. Sejak berpuluh tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Akibatnya, batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan. Pasang surut perkembangan batik Pekalongan memperlihatkan Kota Pekalongan layak menjadi ikon bagi perkembangan batik di Nusantara. Ikon bagi karya seni yang tidak pernah menyerah dengan perkembangan zaman dan selalu dinamis. Kini batik sudah menjadi nafas kehidupan sehari-hari warga Pekalongan (Putra, 2009).

Hal itu disebabkan banyaknya industri yang menghasilkan produk batik. Karena terkenal dengan produk batiknya, Pekalongan pun kini dikenal sebagai Kota Batik. Julukan itu datang dari suatu tradisi yang cukup lama berakar di Kota Pekalongan. Selama periode yang panjang itulah, aneka sifat, ragam kegunaan, jenis rancangan, serta mutu batik ditentukan oleh iklim dan keberadaan serat-serat setempat, faktor sejarah, perdagangan dan kesiapan masyarakatnya dalam menerima paham serta pemikiran baru. Batik yang merupakan karya seni budaya yang dikagumi dunia, diantara ragam tradisional yang dihasilkan dengan teknologi celup rintang, tidak satu pun yang mampu hadir seindah dan sehalus batik Pekalongan (Putra, 2009).

Sebelum kebijakan tentang otonomi daerah ditetapkan tahun 2001, industri batik Pekalongan pernah mengalami masa-masa kejayaan. Salah satu indikator perkembangannya dapat dilihat pada kampung

Setono Pekalongan. Kala itu pada tahun 1939, masyarakat Pekalongan kebanyakan bermata pencaharian batik dan tani. Karena jumlah pengrajin batik khususnya warga kampung Setono saat itu tergolong banyak, maka pada tahun 1942 dibentuklah Koperasi Pengusaha Batik Setono yang disingkat KPBS, yang awalnya berkantor di Sorogenen Pekalongan (Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan, 2011). Terbentuknya KPBS ini merupakan hasil dari pertemuan para pengrajin batik Setono yang akhirnya dari pertemuan tersebut diputuskan untuk membentuk suatu wadah yaitu koperasi yang bertujuan menampung segala aktivitas dan produksi batik (Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan, 2011).

Berawal dari kain batik yang waktu itu merupakan sandang yang banyak dipakai oleh masyarakat khususnya di pulau Jawa dan Sumatra, menyebabkan bahan baku batik khususnya kain mori menjadi sangat dibutuhkan dan dicari. Bahan baku mori saat itu diimpor dari negara Jepang, sehingga terkadang persediaan di toko-toko yang menjual kain mori sering kehabisan stok. Oleh karenanya anggota KPBS berinisiatif mendirikan pabrik untuk memproduksi kain mori sendiri. Dan pada tahun 1962 pabrik mulai dibangun di tepi jalan raya Jakarta-Surabaya tepatnya di wilayah Kelurahan Karangmalang Pekalongan (Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan, 2011).

Kain mori hasil produksi pabrik tersebut sebagian digunakan sendiri dan yang sebagian lagi untuk dijual ke luar kota (Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan, 2011). Setelah berdirinya pabrik tersebut, stok

kain mori sebagai bahan baku batik selalu tersedia. Keadaan ini memberikan keuntungan tersendiri bagi para pengrajin batik Pekalongan, yaitu pembuatan kain batik menjadi semakin lancar, sehingga industri batik Pekalongan mengalami kemajuan yang lebih pesat dibandingkan daerah-daerah penghasil batik lainnya. Pada tahun 1970-an inilah industri batik Pekalongan pernah mengalami masa kejayaan.

Zaman telah berganti seiring perkembangan dunia. Perkembangan zaman merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan secara matang dalam kegiatan perdagangan. Alih-alih mempertahankan kejayaan, salah strategi justru akan membuat keadaan menjadi terpuruk. Tidak adanya inovasi-inovasi maupun produk-produk baru yang dihasilkan dari industri batik, menjadikan industri batik Pekalongan sempat mengalami masa-masa surut dalam sejarah pembatikan di Kota Pekalongan.

Masa-masa itu terjadi sekitar tahun 1980-an. Semakin banyak dibangunnya pabrik-pabrik penghasil kain mori menjadikan industri batik di sekitar daerah tersebut juga mengalami kemajuan, yang menyebabkan semakin ketatnya persaingan (Suharyanto, 2011a). Untuk dapat menyaingi industri batik Pekalongan yang lebih dahulu maju, maka kain batik hasil industri daerah lain tersebut dijual dengan harga yang lebih murah.

Salah satu faktor penyebab harga kain batik dari daerah lain tersebut lebih murah karena kain batik yang dihasilkan diproduksi

menggunakan teknik cap dan kain mori yang digunakan diproduksi menggunakan sistem sablon. Kain batik dengan teknik ini mempunyai keunggulan dalam hal biaya produksi yang lebih rendah, sehingga harga jualnya pun jadi lebih murah dibandingkan batik tulis dengan menggunakan kain mori tenun bukan buatan mesin yang merupakan produk utama para pengrajin batik Pekalongan. Inilah yang menjadikan omset penjualan industri batik Pekalongan menurun secara drastis.

Faktor lainnya seperti yang dijelaskan kepada peneliti dalam wawancara pada tanggal 20 November 2011 dengan Kepala Bidang Perindustrian Disperindagkop Kota Pekalongan, Bambang Suharyanto, ketika industri batik Pekalongan berada pada masa kejayaan tersebut, para pengrajin batik Pekalongan lupa untuk menyiapkan generasi berikutnya guna melanjutkan kejayaan yang sudah tercapai (Suharyanto, 2011a). Hal itu menyebabkan kurang adanya inovasi pada kerajinan batik yang dihasilkan karena masih dijalankan oleh pengrajin batik lama, sedangkan zaman sudah mulai mengalami perubahan.

Dibandingkan hasil industri batik dari daerah lain yang dihasilkan dengan berbagai inovasi yang sejalan dengan perkembangan zaman karena dikelola oleh para pengrajin batik muda yang siap bersaing, para pengrajin batik Pekalongan menjadi kalah dalam persaingan. Dan ketika tiba waktunya para generasi muda melanjutkan kegiatan produksi batik orang tua mereka, tidak mudah untuk membuat inovasi dan ide-ide baru

yang biasanya menjadi ciri khas pola pikir generasi muda kebanyakan yang ingin selalu menjadi lebih baik.

Penyebabnya ialah karena mereka tidak disiapkan untuk meneruskan usaha orang tua mereka yang telah dirintis dengan susah payah hingga mencapai kesuksesan, serta tidak siap menghadapi perkembangan dunia yang semakin kompleks, sehingga menjadikan generasi penerus batik Pekalongan tidak siap untuk persaingan yang semakin ketat. Salah satu dampak menurunnya industri batik Pekalongan saat itu, pabrik kain mori yang didirikan oleh KPBS pun berhenti beroperasi dan disewakan.

Masih menurut Suharyanto (2011a), faktor lain yaitu pemerintah yang kala itu belum menerapkan kebijakan otonomi daerah juga menjadikan Pemda Kota Pekalongan tidak dapat membantu banyak dalam mengembalikan kejayaan industri batik Pekalongan. Oleh karenanya butuh waktu tidak sebentar untuk merintis kembali industri batik Pekalongan agar dapat kembali kepada kejayaannya seperti masa lalu.

4.2.6. Kondisi Industri Batik di Pekalongan Saat Ini

Setelah sempat mengalami penurunan, industri batik Pekalongan kembali bergeliat pada tahun 1990-an. Dan titik baliknya pada tahun 2000, industri batik Pekalongan mulai menghadapi tanda-tanda kesuksesan yang akan kembali dicapai di masa depan. Sekali lagi di

wilayah Setono Pekalongan tolok ukur titik balik tersebut dapat dilihat. Pabrik kain mori yang tadinya sudah tidak beroperasi lagi, dirubah menjadi suatu komplek yang berisi kios-kios yang berjumlah \pm 200 kios untuk dijadikan pusat perbelanjaan batik (Suharyanto, 2011b). Dan tepatnya pada tanggal 8 Juli 2000, secara resmi berdirilah Pasar Grosir Batik Setono yang diresmikan oleh Bapak Walikota Pekalongan kala itu Drs. Samsudiat, M.M (Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan, 2011).

Berdirinya Pasar Grosir Batik Pekalongan membuat Pekalongan beserta batiknya menjadi cepat terkenal. Letaknya yang hanya berjarak 101 Km ke arah barat Semarang dengan waktu tempuh hanya \pm 2 jam saja menggunakan kendaraan, membuat Kota Pekalongan mudah untuk dikunjungi bagi warga Semarang yang ingin berbelanja batik langsung ke pusatnya. Belum lagi letak pasar grosir tersebut yang sangat strategis yaitu di pinggir jalan raya pantura yang merupakan jalur lalu lintas antar kota terpadat di Pulau Jawa, membuat setiap pengendara yang melewati Pekalongan dapat dengan mudah mengetahui bahwa terdapat pasar grosir batik di Kota Pekalongan.

Ini sangat menguntungkan dan memudahkan dalam hal promosi tentang adanya pasar grosir di Pekalongan agar semakin diketahui oleh masyarakat di luar Kota Pekalongan. Terbukti setiap ada libur panjang, jumlah pengunjung pasar grosir tersebut meningkat dibanding hari-hari biasa. Seperti liburan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2010. Mendekati Lebaran, Pasar Grosir Setono mulai ramai didatangi

pengunjung (Pemda Kota Pekalongan, 2010d). Atau juga ketika libur memperingati Hari Raya Waisak pada hari Selasa 17 Mei 2011, menurut ketua Ikatan Pedagang Pasar Grosir Setono (Ipaseno) Kota Pekalongan, Ahmad Shobari pada hari Senin 16 Mei 2011 mengatakan, jika dibandingkan hari biasa jumlah pengunjung meningkat sekitar 5-10%, dan diperkirakan masih akan bertambah hingga hari Selasa (Radio Kota Batik, 2011).

Dari kejadian tersebut kita dapat melihat hasil dari semakin terkenal luasnya batik Pekalongan. Hal ini dapat dijadikan sebagai indikator dalam memantau popularitas batik Pekalongan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pasar Grosir Batik Setono telah menjadi salah satu ikon Kota Pekalongan, dan merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan nama Pekalongan terkenal hingga ke seluruh Indonesia.

Perkembangan industri batik yang terjadi sebenarnya dapat dilihat juga dari jumlah omzet penjualan setiap tahunnya. Jika omzet setiap tahunnya meningkat maka dapat dikatakan bahwa industri batik Pekalongan mengalami kemajuan, dan sebaliknya. Namun peneliti telah mencari data dengan bertanya kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, serta mencari berbagai artikel yang dipublikasikan ke dunia maya, akan tetapi tidak ditemukan data yang dapat menyebutkan jumlah omzet penjualan batik untuk setiap tahunnya.

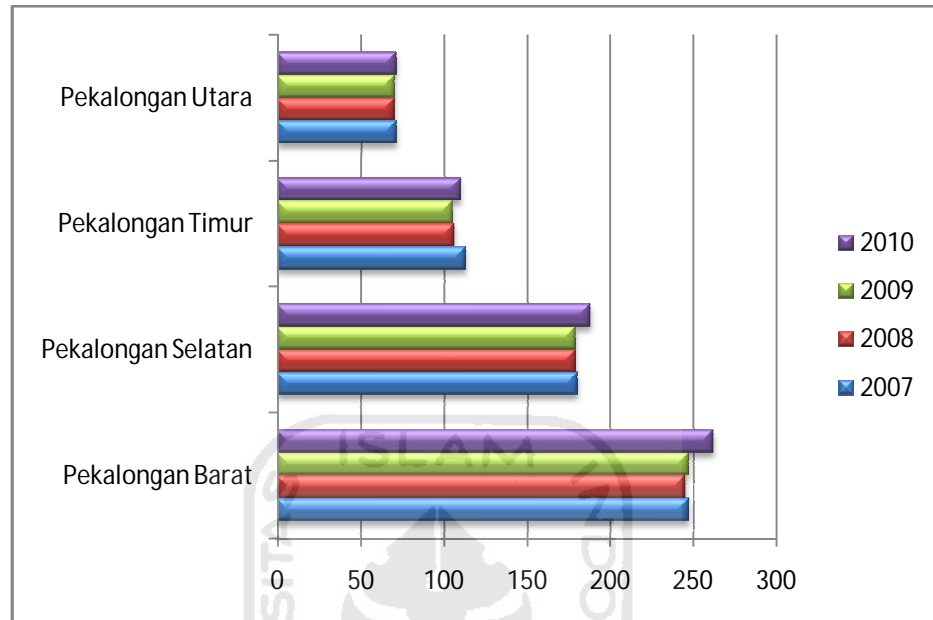
Penghitungan omzet penjualan untuk setiap bulan ataupun tahunnya, biasanya hanya dilakukan oleh pedagang itu sendiri. Seperti yang dituturkan Ketua Umum KPBS, Amiruddin Ichsan mengatakan, dari tahun 2000 pemasukan omzet pedagang di Pasar Grosir Batik Setono \pm Rp 12,9 juta, sedangkan tahun 2009 meningkat menjadi \pm Rp 37 juta (Suara Merdeka, 2010). Tidak sedikit pula pengusaha yang dalam melakukan penghitungan, tidak memperhatikan detail pengeluaran maupun penerimaannya. Kondisi ini umumnya terjadi pada pengusaha batik kecil, jadi dalam penghitungannya jika ada uang lebih maka sudah dapat disebut mendapatkan laba.

Pemerintah kota pun tidak melakukan pendataan omzet penjualan semua pengusaha batik di Kota Pekalongan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena banyaknya jumlah pengusaha batik di Pekalongan dan tidak semua pengusaha mempunyai rincian omzet penjualannya yang dapat dilaporkan untuk dilakukan pendataan. Kondisi seperti ini kebanyakan terjadi pada pengusaha kecil karena kurangnya pengetahuan tentang pencatatan perusahaan.

Kemajuan industri batik Pekalongan juga dapat dilihat dari pertambahan jumlah pengrajin batik Pekalongan dari rentan waktu tahun 2007 hingga 2010 seperti dalam grafik dibawah ini.

Gambar 4.1. Grafik Perkembangan IKM Batik Pekalongan

Periode Tahun 2007 s.d 2010



Sumber : Pemda Kota Pekalongan (2010b)

Dalam tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2010 di setiap kecamatan mengalami kenaikan jumlah pengusaha batik dari tahun sebelumnya. Hanya saja untuk wilayah Pekalongan Utara jumlah pengusaha batik tidak sebesar di wilayah yang lain, karena wilayah Pekalongan Utara sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Setelah Kota Pekalongan cukup terkenal karena pasar grosirnya, banyak pihak baik dari Pemda Kota Pekalongan maupun masyarakat yang berupaya untuk terus memajukan kondisi industri batik Pekalongan, antara lain dengan dibangunnya museum batik dan membentuk kampung batik. Kampung batik di Kota Pekalongan antara lain yaitu Kampung

Batik Kauman, Kampung Batik Pesindon, Kampung Batik ATBM dan Handicraft Medono, Kampung Batik Binagriya dan Kampung Batik Buaran.

Berdirinya kampung batik tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi khususnya tentang batik. Manfaat lain dari berdirinya kampung-kampung batik tersebut yaitu dengan adanya kampung batik, kondisi para pengrajin batik di kampung tersebut menjadi lebih terpantau. Misalnya seperti yang dijelaskan salah satu pengurus Kampung Batik Kauman dalam wawancara dengan peneliti pada tanggal 20 September 2011, M. Nabil Diputra, pengurus Kampung Batik Kauman mengadakan pertemuan rutin untuk para pengrajin batik di kampung Kauman.

Dalam pertemuan tersebut dibahas banyak hal, misalnya keluhan-keluhan para pengrajin batik, masalah yang sedang dihadapi oleh para pengrajin batik, maupun untuk membahas fesyen yang sedang trend saat ini (Diputra, 2011). Kampung Batik Kauman sendiri berdiri pada tanggal 5 September 2007, dan diresmikan secara langsung oleh Wapres Jusuf Kalla.

Kondisi industri batik di Kota Pekalongan dapat dinilai berdasarkan kelompok yang telah dibagi sesuai dengan ruang lingkupnya. Untuk menilai kondisi industri batik di Kota Pekalongan, dapat dilihat dari 4 (empat) aspek, yaitu aspek Sumber Daya Manusi, aspek modal, aspek produksi, dan aspek pemasaran.

a) Aspek Sumber Daya Manusia

Yang terkait dengan permasalahan pada aspek SDM, yaitu adanya beberapa kelemahan pada para pengrajin batik kecil dalam hal pencatatan perusahaan. Mereka kurang pengetahuan dalam hal pembukuan atau administrasi untuk usaha, sehingga menyulitkan pemerintah untuk mendata nilai investasi yang dimiliki para pengrajin batik tersebut (Suharyanto, 2011b).

Hal ini menyebabkan Pemkot mengalami kesulitan ketika melakukan pendataan misalnya nilai investasi untuk melihat perkembangan industri batik yang terjadi, sehingga data yang diterbitkan terkadang menjadi terlambat.

b) Aspek Modal

Beberapa permasalahan yang ditemukan pada aspek modal, masih menurut Diputra (2011), untuk pengusaha kecil seringkali mengalami kendala ketika mereka mendapatkan pesanan dari luar kota. Sistem pembayaran yang tidak tunai misalnya, menyebabkan kegiatan produksi baru bisa dimulai setelah pengusaha tersebut memperoleh kembali modalnya (Diputra, 2011).

Mereka tidak mampu untuk memproduksi terlebih dahulu dengan menggunakan uang kas perusahaan. Jika menggunakan sistem pembayaran di muka, pengusaha kecil cukup terbantu walaupun pada

akhirnya mereka akan mencari pinjaman terlebih dahulu untuk memulai proses produksi (Diputra, 2011).

c) Aspek Produksi

Untuk produksi batik, saat ini sedang mengalami kesulitan. Hal ini terjadi karena kelangkaan dan mahalnya bahan baku untuk pembuatan batik. Perajin batik Pekalongan kewalahan menghadapi harga bahan baku mori dan gondorukem (obat campuran lilin) yang selangit selama beberapa bulan terakhir (Pemda Kota Pekalongan, 2011k). Kepala Disperindagkop Kota Pekalongan, Gunindyo mengatakan, usaha mereka bisa ambruk bila persoalan kenaikan harga bahan baku itu tidak segera teratasi. (Pemda Kota Pekalongan, 2011k). Harga gondorukem yang semula sekitar Rp18.000/Kg kini naik menjadi Rp25.000/Kg.

Kenaikan ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor cuaca. Bahan baku gondorukem adalah getah pinus. Apabila musim kemarau, getah pinus yang dihasilkan akan melimpah sehingga bahan baku mudah didapat, sedangkan apabila musim penghujan getah pinus yang dihasilkan sedikit. Hal itu menyebabkan pabrik tidak bisa mencukupi permintaan pasar, sehingga pasokan bahan baku gondorukem terbatas. Selain itu, Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Heru Siswanto mengatakan, kenaikan harga gondorukem juga ditentukan oleh pasaran dunia, sedangkan Perhutani hanya sebatas menyediakan barang

itu untuk memenuhi kebutuhan para perajin batik (Pemda Kota Pekalongan, 2011n).

Ketua Paguyuban Pembatik Pasirsari Kota Pekalongan, Sodikin mengatakan, akibat kenaikan harga gondorukem ini menyebabkan perajin kesulitan meningkatkan produksi batik (Pemda Kota Pekalongan, 2011n). Kenaikan harga bahan baku batik yang sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir berdampak terhadap pengrajin yang bermodal pas-pasan. Kondisi itu diperparah dengan sulitnya mengajukan pinjaman ke bank (Pemda Kota Pekalongan, 2011c). Ia mengatakan meskipun harga gondorukem dinilai cukup mahal, namun pengrajin terpaksa membeli bahan baku lilin tersebut karena dibutuhkan untuk proses produksi (Pemda Kota Pekalongan, 2011n). Jumlah pengrajin di Pasirsari saat ini ada 110 pengrajin. Dari jumlah tersebut sekitar 10% pengrajin sempat menghentikan proses produksinya sebulan lalu (April), karena keuntungan yang diperoleh tidak bisa menutupi biaya operasional (Pemda Kota Pekalongan, 2011l).

Masih menurut Sodikin, karena mahalnya harga gondorukem kualitas I dapat mengakibatkan berhentinya proses produksi, maka pengrajin batik Pasirsari lebih memilih menggunakan gondorukem dengan kualitas tiga karena harganya masih terjangkau daripada kualitas nomor satu (Pemda Kota Pekalongan, 2011m). Harga gondorukem kualitas tiga sekitar Rp7.000/Kg. Ini dilakukan agar pengrajin batik tetap

bisa berproduksi dan biaya produksinya bisa ditekan sehingga mereka mampu bertahan (Pemda Kota Pekalongan, 2011k).

Kenaikan harga mori pun terjadi akibat faktor cuaca di negara asal impor. Anomali cuaca menyebabkan kekurangan pasokan bahan baku kapas secara global. Sehingga beberapa negara produsen kapas terbesar seperti India dan Australia menerapkan kebijakan kuota ekspor kapas dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik (Pemda Kota Pekalongan, 2010e). Harga kain mori semula sekitar Rp8.000/meter saat ini naik mencapai Rp9.500 - Rp10.000/meter. Kondisi ini diperparah dengan masuknya tekstil bermotif batik asal China.

Ketua Ipaseno, Ahmad Shobari menuturkan, tidak stabilnya harga bahan baku batik mengakibatkan turunnya produksi batik. Kenaikan harga gondorukem dan kain mori mencapai 50% lebih belum lama ini mengakibatkan perajin batik kesulitan bersaing dengan produk tekstil bermotif batik asal China. Munculnya produk tekstil bermotif batik asal China mengakibatkan konsumen membeli kain batik dengan harga murah tanpa mpedulikan perbedaan antara batik printing, cap, dan tulis (Pemda Kota Pekalongan, 2011j).

d) Aspek Pemasaran

Untuk aspek pemasaran sendiri, batik Pekalongan sudah cukup dikenal di Indonesia. Ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengunjung Pasar Grosir Batik Setono setiap liburan datang seperti yang

sudah dijelaskan diatas. Selain itu juga dapat dilihat dari produk batik Pekalongan yang telah tersebar ke seluruh Indonesia. Ketua Paguyuban Kampoeng Wisata Batik Pesindon, Zakaria mengatakan, sekitar 70% produk batik asal Pekalongan sudah tersebar di pasaran Indonesia (Pemda Kota Pekalongan, 2011j).

Akan tetapi penuturan yang berbeda dikatakan oleh Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Kota Pekalongan, Anis Sungkar. Menurut penuturannya, 50% produk tekstil dari Pekalongan dipasarkan untuk kebutuhan lokal, sedangkan 25% diekspor ke Malaysia, dan sisanya diekspor ke negara Timur Tengah (Pemda Kota Pekalongan, 2011g). Walau begitu tetap saja dapat dikatakan bahwa produk batik Pekalongan sudah mendominasi pasar batik nasional.

Memang bagi kebanyakan orang yang awam tentang batik, dahulu mereka berpandangan bahwa Kota Pekalongan adalah produsen batik dengan kualitas dan harga yang rendah, sedangkan batik kualitas tinggi dengan harga mahal diproduksi di Solo maupun Yogyakarta. Namun jika ditelusuri lebih lanjut, kota besar seperti Solo dan Yogyakarta pun mengandalkan industri batik Pekalongan untuk memproduksi dan memasok batik di kedua kota besar tersebut (Dony, 2010).

Salah satunya yang dilakukan produsen batik dari Solo-Yogya adalah mengirimkan desain batik yang diinginkan untuk diproduksi di Pekalongan. Maka tidak heran jika berbelanja batik di pasar-pasar batik di kedua kota besar tersebut, akan banyak menemukan kerajinan batik

yang berlabel Made In Pekalongan. Kalaupun ada industri batik di luar Kota Pekalongan, maka pekerja utamanya biasanya adalah orang Pekalongan (Dony, 2010).

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, produk batik Pekalongan tidak hanya tersebar di dalam negeri saja, namun juga telah tersebar hingga ke luar negeri. Hal senada juga diungkapkan Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Kota Pekalongan, Setyo Susilo. Sasaran tujuan ekspor batik dan tekstil dari Pekalongan antara lain ke Malaysia, Thailand, dan sejumlah negara di Timur Tengah. Adapun produk yang paling banyak diekspor antara lain berupa kain sarung batik dan tekstil batik (Pemda Kota Pekalongan, 2011g). Kain sarung batik Pekalongan bahkan mampu menembus pasar Abu Dhabi dan Yaman (Pemda Kota Pekalongan, 2010h).

Menurut data yang di perbaharui terakhir di situs resmi Disperindagkop Kota Pekalongan, didapatkan data sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Realisasi Ekspor Perusahaan Kota Pekalongan
Januari s.d November 2009**

No	Komoditi	Volume (Kg)	Nilai (Rp)
1	Ikan Beku/Surimi	3.618.000,00	83.597.143.262
2	Pengalengan Ikan	332.485,15	3.746.524.103
3	Tekstil Motif Batik	204.640,40	19.190.206.720
4	Sarung Palekat	909.765,00	34.685.044.944

5	Sarung Batik	49.785,75	11.173.276.942
6	Batik/Garment	21.485,00	15.385.157.230
Jumlah		5.136.161,30	167.777.353.201

Sumber : Pemda Kota Pekalongan (2010f)

Dari data di atas dapat dilihat besarnya nilai ekspor batik dan tekstil bermotif batik pada periode tahun 2009 mencapai lebih dari Rp38 miliar. Data terbaru tahun 2010 maupun 2011 belum diterbitkan di situs resmi Disperindagkop Kota Pekalongan, namun menurut Susilo, nilai ekspor batik dan tekstil bermotif batik Kota Pekalongan hingga Juli 2010 mencapai Rp43,7 miliar (Pemda Kota Pekalongan, 2011g).

Angka-angka tersebut cukup besar melihat kegiatan ekspor ini hanya sebesar 50% dari produk tekstil yang dihasilkan dari industri batik Pekalongan. Akan tetapi karena kondisi industri batik Pekalongan yang saat ini sedang mengalami masa sulit, berdampak pula pada turunnya nilai ekspor batik dan tekstil bermotif batik dari Pekalongan. Nilai ekspor batik dan tekstil bermotif batik pada bulan Juli tahun 2011 sebanyak Rp39,7 miliar, atau turun sekitar 10,8% (Pemda Kota Pekalongan, 2011g).

Faktor lain yang menyebabkan dikenal luasnya produksi batik Pekalongan yaitu ditetapkannya batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Asisten Direktur Umum Kebudayaan Unesco, Francesco Bandarin mengatakan (Pemda Kota Pekalongan, 2011b):

“Kota Pekalongan sudah terkenal, apalagi jika dikaitkan dengan penghargaan UNESCO terhadap batik sebagai warisan budaya tak benda”.

Hal ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, dan warga Pekalongan pada khususnya yang merupakan Kota Batik di Indonesia, tentang pengakuan dunia terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Selain itu juga menjadikan batik semakin dikenal di mata masyarakat internasional. Ini secara tidak langsung merupakan promosi kepada masyarakat dunia, yang diharapkan dapat mempengaruhi ekspor batik agar semakin meningkat di masa yang akan datang.

Berdasarkan data di atas yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian, maka disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana industri batik saat ini telah lebih lengkap dan mengalami kemajuan dibandingkan masa sebelum otonomi daerah, dan sektor pemasaran saat ini telah sukses dalam pelaksanaannya, namun sektor SDM dan modal masih terdapat kendala, dan sektor produksi saat ini masih mengalami krisis bahan baku.

4.3. Strategi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan untuk Mengembangkan Industri Batik

Sejak sebelum kebijakan otonomi daerah ditetapkan, Pemda Kota Pekalongan sudah melakukan beberapa strategi dan upaya untuk

membantu mengembangkan industri batik Pekalongan walau pun hanya sekedarnya saja. Berdirinya Pasar Grosir Batik Setono ini salah satunya, adalah hasil kerja sama antara pengurus KPBS dengan Pemda Kota Pekalongan. Jumlah kios yang dibangun saat itu langsung laku terjual semuanya, itu semua tidak lepas dari strategi yang dilakukan Pemda Kota Pekalongan. Strategi tersebut yaitu dengan mengadakan survei yang dilakukan terlebih dahulu oleh Pemda Kota Pekalongan sebelum Pasar Grosir Batik Setono dibangun (Suharyanto, 2011a).

Pemda Kota Pekalongan menyebarkan leaflet ke daerah-daerah di luar Kota Pekalongan yang berisi tentang pengenalan Pasar Grosir Setono dan produk-produk yang akan dijual di pasar grosir tersebut. Dari leaflet tersebut, pembaca kemudian diminta memberikan pendapat tentang rencana dibukanya pasar grosir tersebut. Setelah diketahui hasil survei menyatakan banyak dukungan dari berbagai pihak, maka dibangunlah Pasar Grosir Batik Setono.

Setelah kebijakan otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, Pemda Kota Pekalongan menjadi semakin gencar dan serius dalam membantu perkembangan industri batik Pekalongan. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, membuat Pemda Kota Pekalongan dapat lebih fokus dalam membantu industri batik Pekalongan untuk mencapai kejayaannya seperti dahulu.

Berbagai strategi dan upaya telah dilakukan oleh Pemda Kota Pekalongan untuk mengembangkan industri batik Pekalongan, dan akan selalu ada kebijakan dan strategi baru sesuai dengan kondisi terbaru yang sedang dialami para pengusaha batik Pekalongan (Suharyanto, 2011a). Upaya dan strategi tersebut dapat digolongkan sesuai dengan aspek yang digolongkan berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi para pengrajin batik Pekalongan.

a) Strategi pada Aspek Sumber Daya Manusia

Dalam aspek SDM, menurut Suharyanto (2011b), hambatan berupa kurangnya pengetahuan pengusaha batik kecil tentang pembukuan disiasati oleh pemerintah dengan mengadakan penyuluhan dan pelatihan administrasi oleh Pemda Kota Pekalongan. Ini bertujuan agar pencatatan keuangan perusahaan tidak kacau, dan manajemen perusahaan menjadi lebih baik (Suharyanto, 2011b). Dengan pencatatan yang rapi, maka mempermudah dilakukannya pendataan misalnya nilai investasi untuk memantau perkembangan industri di Pekalongan, seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2. Daftar IKM Produk Unggulan Kota Pekalongan
(Tahun 2010 Semester I)**

No	Jenis Industri	Jml. Unit Usaha	Jml. Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp.Juta)
1	Batik	631	9.944	24.230,92
2	Pakaian Jadi dari Tekstil	361	3.556	12.814,81
3	Pembekuan Ikan	6	50	406,20
4	Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	1	396	11.500,00
5	Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	5	10	13.450,00
6	Penggaraman/Pengeringan Ikan	23	664	1.051,10
7	Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	21	620	7.279,02
8	Pengolahan Teh dan Kopi	37	1.736	10.156,35
9	Pertenunan	1	29	597,24
10	Pertenunan ATBM	112	2.143	4.996,36
11	Pertenunan ATM	15	1.317	25.502,05

Sumber : Pemda Kota Pekalongan (2010a)

Menurut catatan di atas, nilai investasi industri kecil menengah (IKM) batik di Kota Pekalongan pada semester pertama tahun 2010 mencapai Rp24,23 milyar rupiah, sedangkan untuk nilai investasi tahun 2011 semester pertama belum diketahui besaran jumlahnya. Pasalnya

sebagian kondisi usaha pengusaha belum dapat menentukan nilai yang dimiliki (Pemda Kota Pekalongan, 2011e). Oleh karenanya dengan pelatihan pembukuan tersebut, diharapkan catatan keuangan perusahaan menjadi lebih baik, dan pemerintah dapat dengan mudah mengumpulkan data untuk menilai investasi yang dimiliki.

b) Strategi pada Aspek Modal

Selanjutnya dari aspek modal, masih menurut Suharyanto (2011b), pemerintah sebenarnya sudah berusaha membantu dengan cara bekerjasama dengan bank untuk mempermudah pengusaha kecil dalam hal permodalan. Kerja sama tersebut diantaranya kesepakatan untuk memberikan bunga yang lebih rendah bagi warga Pekalongan yang ingin mengajukan pinjaman guna mengembangkan usahanya dibandingkan daerah lain (Suharyanto, 2011b).

Namun pada kenyataannya, tetap saja para pengusaha tidak banyak yang mengajukan pinjaman dana untuk usaha mereka. Pasalnya dalam prosedur wajib bank yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan pinjaman, terdapat beberapa persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi para pengusaha kecil. Syarat tersebut salah satunya yaitu peminjam harus memiliki penjamin yang siap menjamin bahwa perusahaan si peminjam akan membayar hutang pinjamannya. Sementara penjamin haruslah sebuah organisasi atau perusahaan besar yang sudah diakui kapasitasnya. Syarat tersebut cukup susah mengingat masih

banyak pengusaha kecil yang tidak tergabung dalam suatu induk organisasi (Diputra, 2011).

c) Strategi pada Aspek Produksi

Untuk aspek produksi dan pemasaran, pemerintah terbilang paling gencar dalam pelaksanaannya. Aspek produksi dan pemasaran sendiri erat kaitannya dengan aspek sarana dan prasarana. Misalkan dalam aspek produksi, untuk produksi yang lebih baik lagi maka haruslah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Dalam hal alat produksi misalnya, menurut Suharyanto (2011b), Pemda Kota Pekalongan menyediakan bantuan berupa mesin jaquart untuk membuat kain yang lebih halus, serta ATBM kepada beberapa pengusaha kecil produsen kain yang membutuhkan.

Bantuan tersebut didapat dari program OVOP (One Village One Product) dari Kementerian Perindustrian (Pemda Kota Pekalongan, 2011d). Kemudian bagi yang tidak mendapatkan bantuan, pemerintah memberikan diskon 25% bagi yang ingin mengganti mesin yang lama dengan mesin yang baru (Suharyanto, 2011b). Ada juga bantuan berupa minyak tanah yang didapat juga dari Kementerian Perindustrian yang diajukan oleh Pemda Kota Pekalongan. Minyak tanah merupakan bahan bakar kompor yang digunakan pengrajin batik ketika sedang membatik untuk menghangatkan malam (lilin) agar tidak membeku atau mengeras (Suharyanto, 2011b).

Selain bantuan yang ringan, Pemda Kota Pekalongan juga memberikan bantuan yang tergolong berat berupa unit pengolahan limbah untuk industri atau disebut IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Namun unit pengolahan limbah tersebut tidak diberikan satu per satu kepada pengusaha batik, karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk itu, unit pengolahan limbah tersebut dibangun di beberapa tempat untuk digunakan secara bersama oleh para pengusaha batik, diantaranya dibangun di Kelurahan Jenggot, Kelurahan Kauman, dan Kelurahan Pasirsari (Suharyanto, 2011b).

Bantuan dalam sektor produksi tidak hanya di sektor alat atau sarannya saja, sektor prasarana juga mendapat bantuan berupa pelatihan mode dengan mendatangkan tenaga ahli seorang designer dari Jakarta (Diputra, 2011). Hal senada diungkapkan pula oleh Suharyanto. Menurutnya ini bertujuan untuk mengetahui mode yang sedang trend, dan kemungkinan perkembangan mode yang akan terjadi di masa yang akan datang, agar batik Pekalongan yang dihasilkan tetap sejalan dengan perkembangan mode dunia (Suharyanto, 2011b).

d) Strategi pada Aspek Pemasaran

Beberapa strategi pada sektor pemasaran telah dilakukan Pemda Kota Pekalongan, diantaranya dengan menyelenggarakan festival dan pameran batik. Keseriusan Pemda Kota Pekalongan untuk membantu direalisasikan melalui penyelenggaraan festival Pekan Batik Nusantara

(PBN) dan Pekan Batik Internasional (PBI) yang digelar setiap tahun (Pemda Kota Pekalongan, 2010c). Aspek pemasaran sendiri dalam strategi ini erat hubungannya dengan aspek pariwisata. Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Pekalongan, Doyo Budi Wibowo mengatakan, momentum PBN dan PBI akan menambah poin kerajinan batik sebagai wahana wisata di Kota Pekalongan (Pemda Kota Pekalongan, 2010c).

Selain itu, Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan saat membuka festival PBN, Selasa 26 Oktober 2010, juga mendukung langkah Pemda Kota Pekalongan ini dengan memberikan kesempatan kerajinan batik Pekalongan dipamerkan di Jakarta. Bahkan, Anggota Komisi VIII DPR RI, Ingrid Maria Palupi Kansil yang telah dinobatkan sebagai Duta Batik Pekalongan oleh Walikota Pekalongan, Basyir Achmad pada 26 Oktober 2010, juga siap mempromosikan kerajinan batik ini (Pemda Kota Pekalongan, 2010c).

Kegiatan yang paling baru adalah PBI yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Batik Nasional 3 Oktober 2011. Pemda Kota Pekalongan mengundang sedikitnya 30 istri diplomat yang berasal dari sejumlah negara ASEAN, Afrika Selatan, dan Eropa. Festival tersebut juga dihadiri oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono, istri Wakil Presiden Herawati Budiono, dan beberapa istri menteri Kabinet Indonesia Bersatu (Pemda Kota Pekalongan, 2011a). Banyak kegiatan yang dilakukan

dalam festival tersebut, diantaranya adalah mengunjungi Kampung Wisata Batik Pesindon dan Kampung Batik Kauman.

Selain festival yang diadakan oleh Pemda Kota Pekalongan, Pemkot juga mengajak para pengusaha untuk memperbanyak mengikuti pameran di luar kota (Suharyanto, 2011a). Sebagai bantuannya, Pemkot memfasilitasi peserta yang ingin mengikuti pameran di luar kota dengan menyediakan transportasi dan penginapan setiap kali ada pameran di luar kota (Suharyanto, 2011a). Strategi lain dari Pemda Kota Pekalongan untuk mengenalkan produk-produk batik Pekalongan kepada konsumen di luar kota yaitu dengan menyebarkan leaflet untuk memperkenalkan produk batik Pekalongan yang dipasarkan kepada masyarakat di luar Kota Pekalongan (Suharyanto, 2011a).

Bantuan lain dalam hal sarana dan prasarana yaitu bantuan berupa dana dan telecenter untuk kampung batik (Diputra, 2011). Beberapa telecenter yang sudah dibangun yaitu di Kampung Batik Kauman, pusat grosir Setono, Museum Batik dan Kampung Wisata Batik Pesindon (Pemda Kota Pekalongan, 2011f). Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Marzan Aziz Iskandar, ketika meresmikan telecenter di Kampung Wisata Batik Pesindon mengatakan, telecenter diharapkan dapat mengidentifikasi potensi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan layanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan spesifik pengguna.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kebijakan akan muncul karena adanya permasalahan. Melihat kondisi industri batik akhir-akhir ini yang sedang mengalami kesulitan, beberapa strategi pun dibuat oleh Pemda Kota Pekalongan. Misalnya kelangkaan dan mahalnya bahan baku yang sekarang menjadi kendala serius bagi kelangsungan industri batik Pekalongan. Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan Pemda Kota Pekalongan untuk membantu meringankan pengrajin batik.

Walikota Pekalongan, Basyir Achmad mengatakan, untuk menjamin pasokan gondorukem bagi pengrajin batik Pekalongan, Walikota Pekalongan meminta kepada Perhutani guna memprioritaskan pasokan gondorukem bagi pelaku industri batik tersebut (Pemda Kota Pekalongan, 2011o). Selama ini, bahan baku utama bagi pengrajin batik tersebut lebih banyak diekspor daripada dijual di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pengrajin batik lokal (Pemda Kota Pekalongan, 2011o).

Masih menurut Walikota Pekalongan, Basyir Achmad, untuk meringankan kesulitan para pengrajin batik, Pemkot akan mengajukan subsidi ke Menteri Perindustrian (Pemda Kota Pekalongan, 2011n). Selain itu, menurut Kepala Bidang Koperasi dan UKM Disperindagkop Kota Pekalongan, Setyo Susilo, untuk mengatasi masalah yang dihadapi pelaku UKM itu, Pemkot akan memberikan bantuan modal secara bertahap sebesar Rp10 juta - Rp20 juta pada lima UKM (Pemda Kota Pekalongan, 2011c).

Selanjutnya untuk mengatasi penjualan yang menurun akibat masuknya produk tekstil bermotif batik asal China, Pemda Kota Pekalongan mempunyai strategi untuk membendung masuknya tekstil bermotif batik asal China tersebut di pasaran untuk mengembangkan produk batik lokal. Strategi yang disiapkan yaitu dengan cara memberikan informasi dan pendidikan konsumen agar masyarakat bisa membedakan batik tulis dan cap dengan produk tekstil bermotif batik seperti dijelaskan Kepala Disperindagkop Kota Pekalongan, Gunindyo (Pemda Kota Pekalongan, 2011i). Menurutnya, Pemkot tidak berhak melarang masuknya produk impor di pasaran tetapi hanya bisa mengarahkan konsumen agar bisa membedakan produk batik asli dengan produk tekstil bermotif batik (Pemda Kota Pekalongan, 2011i).

Selain memberikan informasi pembekalan konsumen, Pemkot juga memasang label berukuran 2cm dan ditandai logo 'Batik Indonesia'. Ia mengatakan kebijakan Pemkot ini diperkirakan akan meningkatkan kepercayaan terhadap para konsumen lokal dan mancanegara, sehingga diharapkan berimbang dapat meningkatkan omzet penjualan batik (Pemda Kota Pekalongan, 2011i). Saat ini Pemda Kota Pekalongan telah memfasilitasi 20 pengusaha batik dengan memberikan subsidi biaya pelabelan sebesar Rp1 juta (Pemda Kota Pekalongan, 2011i). Meskipun masih banyak hal yang harus dibenahi, namun harapan masyarakat dan Pemda Kota Pekalongan untuk menjaga kejayaan industri batik Pekalongan harus tetap diwujudkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa Pemda Kota Pekalongan sangat serius dalam mengembangkan industri batik Pekalongan. Telah banyak upaya dan strategi yang dilakukan sebagai wujud keseriusannya dalam mengembangkan industri batik Pekalongan. Jika dilihat dari strategi-strategi yang telah dilakukan, maka strategi-strategi tersebut termasuk ke dalam tipe strategi yang kedua yaitu Strategi Intensif, dan termasuk tingkatan strategi yang pertama yaitu *Enterprise Strategy*, dengan dasar perencanaan strategisnya termasuk ke dalam Perencanaan Intuitif Antisipatif.

4.4. Pengaruh Kemajuan Industri Batik Kota Pekalongan terhadap Kemandirian Daerah Kota Pekalongan

Ketika peneliti melakukan survey dengan bertanya tentang pengaruh industri batik terhadap pendapatan daerah kepada beberapa warga Kota Pekalongan, banyak pihak yang mengira bahwa besarnya industri batik Pekalongan mempengaruhi PAD Kota Pekalongan. Seperti yang dikatakan oleh Imron Ma'arif (23), warga Kelurahan Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat, seorang mantan pengurus sebuah komunitas pemuda sadar budaya batik misalnya, ia mengatakan bahwa menurutnya kemajuan industri batik mempengaruhi pendapatan daerah.

Ketidaktahuan bahkan juga terjadi di kalangan pegawai Kantor Sekretariat Pemda Kota Pekalongan. Pernyataan serupa Imron diungkapkan oleh Kartolo (37) pegawai kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Pekalongan.

Ia mengatakan bahwa menurutnya industri batik menyumbangkan pendapatan pada PAD Kota Pekalongan. Akan tetapi setelah peneliti meminta keterangan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pekalongan dan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Nur Prihantono, dijelaskan bahwa tidak ada pemasukan secara khusus dari industri batik semisal pajak industri batik (Prihantono, 2011).

Masih menurut Prihantono (2011) terkait tidak adanya pemasukan khusus dari batik, ia menjelaskan bahwa dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan, tidak terdapat aturan untuk memungut pajak ataupun retribusi dari sektor batik (Prihantono, 2011). Dari data rincian realisasi pendapatan daerah di DPPKAD Kota Pekalongan juga tidak tercantum industri batik sebagai salah satu sektor yang diwajibkan membayar pajak maupun retribusi daerah.

Dalam rekapitulasi realisasi pendapatan daerah Kota Pekalongan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 (empat) komponen, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.3. Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2010**

No. Rek	Uraian
4.1	Pendapatan Asli Daerah
4.1.1	Pajak Daerah
4.1.2	Retribusi Daerah
4.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Sumber : Pemda Kota Pekalongan (2010g)

Dari keempat komponen tersebut, jika industri batik termasuk kedalam sektor yang menyumbangkan pendapatan, maka kemungkinan besarnya industri batik masuk kedalam kelompok pajak daerah atau retribusi daerah. Untuk itu peneliti meminta rincian dari kedua komponen PAD tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya industri batik sebagai sektor yang menghasilkan pendapatan.

Rincian pajak daerah pada PAD Kota Pekalongan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.4. Rincian Realisasi Pajak Daerah Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2010**

No. Rek	Uraian
4.1.1	Pajak Daerah
1	Pajak Hotel
2	Pajak Restoran
3	Pajak Hiburan
4	Pajak Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan
6	Pajak Parkir

Sumber : Pemda Kota Pekalongan (2010g)

Untuk retribusi daerah dalam PAD Kota Pekalongan, terdapat pengelompokan lagi menjadi 3 (tiga) komponen pendapatan menurut asal pendapatannya, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu (Pemda Kota Pekalongan, 2010g). Rincian dari ketiga komponen pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5. Rincian Realisasi Retribusi Daerah Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2010

No. Rek	Uraian
4.1.2	Retribusi Daerah
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum
1	Pelayanan Kesehatan
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3	Penggantian Cetak KTP dan Akte Capil
4	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5	Parkir di Tepi Jalan Umum
6	Pelayanan Pasar
7	Pengujian Kendaraan Bermotor
39	Jasa Pelayanan TPI
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha
1	Pemakaian Kekayaan Daerah
4	Terminal
6	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7	Penyedotan Kakus
8	Rumah Potong Hewan
10	Tempat Rekreasi dan Olah Raga
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu
1	Ijin Mendirikan Bangunan

3	Ijin Gangguan
4	Ijin Trayek
6	Ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet
7	Biaya Adm. Umum/Leges
8	Ijin Usaha Industri
9	Ijin Usaha Perdagangan
10	Tanda Daftar Perusahaan
12	Ijin Pemdokan
13	Ijin Dispensasi Jalan
14	Ijin Usaha Salon Kecantikan
15	Ijin Usaha Jasa Konstruksi
	Ijin Usaha Perikanan

Sumber : Pemda Kota Pekalongan (2010g)

Berdasarkan analisis dari data di atas, tidak ditemukan rincian di dalam PAD Kota Pekalongan yang menyebutkan bahwa industri batik termasuk kedalam komponen atau kategori sektor yang memberikan pengaruh terhadap keuangan daerah. Pernyataan ini telah memperkuat pernyataan Prihantono (2011) yang terlebih dahulu diungkapkan tentang tidak adanya pemasukan secara khusus dari industri batik. Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa industri batik di Kota Pekalongan tidak menyumbangkan pendapatan pada PAD Kota Pekalongan.

Kemajuan industri batik di Kota Pekalongan memang tidak berpengaruh secara langsung terhadap PAD Kota Pekalongan, akan tetapi

kemajuan industri batik yang terjadi telah berpengaruh terhadap beberapa komponen pendapatan pada PAD Kota Pekalongan. Kemajuan industri batik telah menyebabkan semakin banyaknya perusahaan batik yang bermunculan, dari yang sekedar berdagang komoditi batik maupun yang memproduksi batik. Dampak dari bertambahnya jumlah perusahaan batik yang berdiri ini adalah bertambahnya jumlah pembayar Retribusi Daerah, tepatnya pada komponen pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu.

Pada Retribusi Perijinan Tertentu, terdapat kategori Retribusi Ijin Usaha Industri dan Retribusi Ijin Usaha Perdagangan yang mendapatkan pemasukan dari beberapa industri dan perusahaan batik yang membayar ijin usaha industri maupun ijin usaha perdagangan secara rutin setiap tahunnya. Tercatat dari 53 industri kecil yang membayar ijin usaha industri setiap tahunnya, 24 diantaranya adalah industri batik, sedangkan dari 236 perusahaan kecil yang membayar ijin usaha perdagangan setiap tahunnya, 226 diantaranya adalah perusahaan batik (Pemda Kota Pekalongan, 2010g). Dengan data tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa kemajuan industri batik di Kota Pekalongan secara tidak langsung telah berpengaruh terhadap PAD Kota Pekalongan.

Pengaruh dari kemajuan industri batik di Kota Pekalongan juga dirasakan pada sektor pariwisata kota tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, strategi dalam sektor pemasaran batik Pemda Kota Pekalongan berhubungan erat dengan sektor pariwisatanya. Penyelenggaraan pekan batik dan festival sebagai strategi dalam aspek pemasaran menambah poin

kerajinan batik sebagai wahana wisata di Kota Pekalongan. Upaya Pemkot mendorong sektor kepariwisataan ini tampaknya kini terus mendapatkan dukungan dari Pemprov Jateng maupun Pemerintah Pusat. Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, Tjetjep Suparman juga memanfaatkan momentum festival PBN dengan melakukan kerja sama dengan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan (Pemda Kota Pekalongan, 2010c).

Paket wisata batik yang disiapkan Pemda Kota Pekalongan antara lain wisata belanja di Pasar Grosir Setono, wisata edukasi di Kampung Batik dan Museum Batik Nasional Pekalongan. Kampung Batik selain bermanfaat untuk mendapatkan informasi tentang kondisi pengrajin batik di wilayah tersebut, juga dapat dijadikan penunjang wahana wisata batik. Kampung Batik dapat menjadi tempat wisata bagi yang ingin belajar atau pun sekedar mengetahui informasi seputar batik mulai dari proses pembuatannya hingga menjadi barang jadi. Salah satu strategi memperkenalkan wisata batik ini yaitu dengan mengajak setiap tamu pemerintah Pemda Kota Pekalongan untuk mengunjungi Kampung Batik yang ada (Diputra, 2011).

Selanjutnya untuk wisata di Museum Batik Nasional Pekalongan, wisatawan dapat melihat-lihat koleksi batik yang dipamerkan yang berjumlah lebih dari 1.000 lembar kain batik (Antara News, 2011), dan belajar untuk mengenali motif-motif batik yang ada. Sebagai pengaruh dari strategi pemasaran Pemkot terhadap sektor wisata batik, sekarang ini tingkat kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Museum Batik Nasional

Pekalongan meningkat selama Januari hingga April 2011 (Pemda Kota Pekalongan, 2011h). Menurut petugas Bagian Pemasaran dan Promosi Museum Batik Nasional Pekalongan, Indah Ajeng Sekarwati, tingkat kunjungan wisatawan ke Museum Batik Nasional Pekalongan selama Januari s.d April 2011 mencapai 4.000 pengunjung (Pemda Kota Pekalongan, 2011h).

Ia mengatakan, peningkatan itu terjadi pada April 2011 karena pada bulan tersebut Pemda Kota Pekalongan telah menyelenggarakan sejumlah festival dalam rangka peringatan hari jadi Kota Pekalongan. Beberapa wisatawan yang berkunjung ke Museum Batik Nasional Pekalongan itu antara lain dari Jakarta, Depok, Bandung, dan Tegal. Adapun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke museum itu antara lain dari Belanda, Amerika, Jerman, Finlandia, dan Singapura (Pemda Kota Pekalongan, 2011h).

Masih menurut penuturan Indah dalam wawancara pada kurun waktu yang berbeda, tingkat kunjungan wisatawan ke Museum Batik Nasional Pekalongan pada awal Juli 2011 mencapai 200 orang per hari, atau naik 100% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Juni 2011 yang sebanyak 100 orang (Antara Jateng, 2011). Menurutnya, naiknya tingkat kunjungan wisatawan tersebut karena pada awal Juli 2011 bersamaan dengan musim libur sekolah. Sejumlah wisatawan yang berkunjung antara lain berasal dari Bandung, Jakarta, Malang, Cilacap, Jayapura, dan Kalimantan, sedangkan

wisatawan mancanegara yang berkunjung antara lain dari Korea Selatan, Belanda, Jepang, Portugal, dan Spanyol (Antara Jateng, 2011).

Dari fakta diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kota Pekalongan sekarang sudah mulai populer sebagai Kota Batik dan tempat wisata batik tidak hanya di lingkup nasional saja, namun juga internasional. Adanya berbagai festival yang dilakukan Pemkot sebagai strategi pemasaran dalam rangka untuk mengembangkan industri batik berdampak pula pada sektor wisata. Selain itu juga terlihat pengaruh pengakuan UNESCO atas kerajinan batik sebagai warisan budaya Indonesia, terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Museum Batik Nasional Pekalongan.

Beberapa strategi pemasaran yang telah dilakukan Pemda Kota Pekalongan telah berimbas pada sektor pariwisatanya. Pekalongan kini telah terkenal sebagai tujuan untuk wisata batik baik oleh wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Kepopuleran Kota Pekalongan di tingkat internasional patut dibanggakan oleh masyarakat Pekalongan. Kepingannya, diharapkan kunjungan wisata ke Pekalongan terus meningkat. Semoga target yang dicanangkan oleh Pemkot untuk menjadikan Pekalongan sebagai kota wisata batik menarik banyak wisatawan lokal maupun wisatawan internasional untuk berkunjung ke Pekalongan, dan menjadikan Pekalongan sebagai Kota Batik Dunia.

Melihat perkembangannya sekarang ini, industri batik Pekalongan masih berpotensi untuk terus maju dan berkembang. Kondisi ini menjadikan industri batik sebagai salah satu sumber daya daerah dari sektor industri yang

sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh Pemkot Pekalongan. Industri batik dapat ikut berperan serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menguatkan keuangan daerah. Bahkan jika dimanfaatkan secara maksimal, bukan tidak mungkin industri batik dapat menjadikan Kota Pekalongan sebagai kota yang mandiri.

Begitu besarnya potensi yang dimiliki industri batik di Kota Pekalongan, maka akan sangat besar pula manfaat finansial yang diperoleh jika Pemda Kota Pekalongan memang memungkinkan untuk mengeluarkan keputusan perihal penetapan industri batik sebagai sektor yang ikut menyumbangkan pendapatan untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. Penetapan tersebut dapat berupa kebijakan penetapan pajak atau retribusi jasa usaha untuk sektor batik dengan mempertimbangkan kembali Peraturan Daerah yang ada.

Adanya sumbangsih industri batik untuk PAD Kota Pekalongan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan Kota Pekalongan, termasuk di dalamnya industri batik Pekalongan, mengingat bahwa nantinya pendapatan daerah yang diperoleh digunakan juga untuk keperluan mengembangkan industri batik di Kota Pekalongan.

Dari analisa data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian, dapat dilihat bahwa kemajuan industri batik di Kota Pekalongan secara tidak langsung berpengaruh terhadap keuangan daerah, sehingga kemajuan industri batik dapat dikatakan berpengaruh terhadap kemandirian daerah Kota Pekalongan.

4.5. Kesimpulan

Industri batik di Kota Pekalongan mengalami banyak kemajuan, sarana dan prasarananya telah lengkap, sektor pemasarannya cukup sukses, namun saat ini masih terdapat kendala pada sektor SDM, modal, dan sektor produksi. Strategi dalam mengembangkan industri batik telah banyak dilakukan oleh Pemda Kota Pekalongan sebagai wujud keseriusannya dalam mengembangkan industri batik di Kota Pekalongan, dan kemajuan industri batik di Kota Pekalongan berpengaruh terhadap kemandirian daerah Kota Pekalongan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh serta analisa yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan :

1. Anggaran merupakan alat yang sangat penting untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan, dan APBD adalah alat untuk meningkatkan pelayanan publik. Kualitas dan kuantitas SDM merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan.
2. Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan dan keunggulan bersaing. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, identifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan dan rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif, untuk menentukan tipe dan tingkatan strategi yang tepat.
3. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan peneliti sebagai instrumen kuncinya. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai macam teknik pengumpulan data (triangulasi), dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka data

yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, dan dapat dipercaya sehingga jawaban atas permasalahan lebih tepat.

4. Dilihat dari sarana dan prasarananya, industri batik di Kota Pekalongan mengalami banyak kemajuan sejak tahun 2001 hingga 2011. Sarana dan prasarananya telah lengkap untuk mendukung kemajuan industri batik di Kota Pekalongan. Dilihat dari kondisinya, sektor pemasaran cukup sukses dalam memperkenalkan dan memasarkan batik Pekalongan, namun saat ini masih terdapat kendala pada sektor SDM, modal, dan sektor produksi.
5. Pemda Kota Pekalongan sangat serius dalam membantu perkembangan industri batik Pekalongan. Banyak strategi dan upaya yang telah dilakukan Pemkot Pekalongan sebagai wujud keseriusannya dalam mengembangkan industri batik di Kota Pekalongan. Strategi-strategi yang dilakukan Pemkot Pekalongan dalam mengembangkan industri batik termasuk ke dalam tipe strategi yang kedua, yaitu Strategi Intensif, dan termasuk tingkatan strategi yang pertama yaitu *Enterprise Strategy*, dengan dasar perencanaan strategisnya termasuk ke dalam Perencanaan Intuitif Antisipatif.
6. Kemajuan industri batik Pekalongan secara tidak langsung berpengaruh terhadap keuangan daerah Kota Pekalongan, karena beberapa komponen pendapatan pada PAD Kota Pekalongan mengalami peningkatan jumlah pendapatan sebagai dampak dari kemajuan industri batik yang terjadi di Kota Pekalongan. Dengan demikian kemajuan industri batik Pekalongan

berpengaruh terhadap kemandirian daerah Kota Pekalongan. Selain itu, kemajuan industri batik Pekalongan juga berpengaruh pada sektor pariwisata Kota Pekalongan dengan menjadikan batik sebagai wahana wisatanya.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya data dalam bentuk arsip yang diperoleh dalam penelitian ini, karena informasi atau data-data tersebut belum diperbaharui, tidak diarsipkan ataupun tersebar. Data-data yang tidak diperoleh tersebut seperti data perkembangan IKM batik dari tahun 2001 s.d 2006, data realisasi ekspor perusahaan Kota Pekalongan periode 2001 s.d 2008 dan tahun 2010-2011, data omzet penjualan batik Kota Pekalongan dari tahun 2001 s.d 2011, rincian secara detil perusahaan batik yang membayar retribusi ijin industri dan ijin perdagangan.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dengan mengacu hasil analisis, penulis mengemukakan sejumlah saran guna mengembangkan industri batik Pekalongan, yaitu :

1. Pembinaan dan pengembangan SDM pelaku industri batik kecil, agar usaha mereka menjadi lebih maju dan tertata.

2. Memperbaharui kebijakan tentang peringanan modal usaha, mengingat strategi yang sudah dilakukan kurang memberikan pengaruh yang signifikan. Misalnya bekerjasama dengan bank setempat untuk menentukan persyaratan yang lebih mudah khusus bagi pelaku industri batik yang ingin mengajukan pinjaman, sehingga dapat menjamin pelaku industri batik kecil untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah.
3. Penegasan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengadaan bahan baku pembuatan batik agar lebih mengutamakan kepentingan untuk industri batik demi keberlangsungan industri batik Pekalongan.



DAFTAR PUSTAKA¹

- Abimanyu, A., & Megantara, A. (2009). *Era Baru Kebijakan Fiskal*. Kompas.
- Adi, P. H. (2006). *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Padang: SNA 9.
- Antara Jateng. (2011, Juli 13). *Kunjungan Museum Batik Naik 100 Persen*. Dipetik Desember 13, 2011, dari ANTARAJATENG.com: <http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=47713>
- Antara News. (2011, September 30). *Museum Batik Nasional Simpan 1.070 Koleksi Batik*. Dipetik Desember 14, 2011, dari ANTARANEWS.com: <http://www.antaraneews.com/berita/277826/museum-batik-nasional-simpan-1070-koleksi-batik>
- Aurino. (2007, Desember 8). *Sejarah Batik Indonesia*. Dipetik Desember 6, 2011, dari AURINO.COM: <http://aurino.com/wordpress/?p=180>
- Berutu, R. M. (2009). *Pengaruh APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dairi*. Medan: Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Diputra, N. (2011, September 20). (U. B. Primajaya, Pewawancara)
- Dony. (2010, November 13). *Batik*. Dipetik Oktober 26, 2011, dari dolphino junior: http://semoetlangkrangs.blogspot.com/2010_11_07_archive.html
- Dwiranda. (2007). *Efektifitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode Tahun 2002-2006*. Bali: Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mepow Blog. (2009, Maret 13). *Sejarah Batik Indonesia*. Dipetik November 13, 2011, dari Mepow Blog: <http://mepow.wordpress.com/2009/03/13/sejarah-batik-indonesia/>
- Moleong, L. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

¹ Daftar Pustaka dibuat dengan menggunakan referensi otomatis pada Microsoft Word 2007 dengan style APA.

- Mujiwardhani, A. (2008). *Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten Cilacap Sebelum dan Selama Otonomi Daerah (Tinjauan Keuangan Daerah)*. Surakarta: Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Muliana. (2010). *Pengaruh Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan. (2011, Desember 29). *Sejarah Berdirinya Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan*. Dipetik Januari 22, 2011, dari Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan: http://pasargrosirsetono.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=6
- Pemda Kota Pekalongan. (2011a, September 26). *30 Istri Diplomat Diundang Hadiri Peringatan Hari Batik Nasional*. Dipetik November 29, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan: http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=394:30-istri-diplomat-diundang-hadiri-peringatan-hari-batik-nasional&catid=82:pekan-batik-nusantara
- Pemda Kota Pekalongan. (2011b, November 23). *Batik Pekalongan Mengagumkan*. Dipetik November 29, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan: http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=412:batik-pekalongan-mengagumkan&catid=83:pelatihan
- Pemda Kota Pekalongan. (2010a, Juli 2). *Data IKM Produk Unggulan Kota Pekalongan*. Dipetik November 29, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan: http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=122
- Pemda Kota Pekalongan. (2010b). *Data Perkembangan IKM Kota Pekalongan*. Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia: Disperindagkop Kota Pekalongan.
- Pemda Kota Pekalongan. (2011c, April 28). *Industri Batik Kesulitan Bahan Baku*. Dipetik Desember 10, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan: http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=342:industri-batik-kesulitan-bahan-baku&catid=85:pelatihan&Itemid=130
- Pemda Kota Pekalongan. (2011d, November 29). *Industri Tenun Kota Pekalongan Sekarang*. Dipetik November 29, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan:

http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=413:industri-tenun-sekarat&catid=85:pelatihan&Itemid=130

Pemda Kota Pekalongan. (2011e, September 19). *Investasi IKM Batik Rp. 242 Triliun*. Dipetik November 29, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan:

http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=390:investasi-ikm-batik-rp-242-triliun&catid=85:pelatihan&Itemid=130

Pemda Kota Pekalongan. (2011f, April 5). *Kepala BPPT Resmikan Telecenter Pesindon*. Dipetik November 29, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan:

http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=335:kepala-bppt-resmikan-telecenter-pesindon&catid=87:telecenter&Itemid=133

Pemda Kota Pekalongan. (2011g, Oktober 18). *Krisis Eropa Belum Pengaruhi Ekspor Tekstil*. Dipetik Desember 9, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan:

http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=403:krisis-eropa-belum-pengaruhi-ekspor-tekstil&catid=76:perdagangan

Pemda Kota Pekalongan. (2011h, Mei 23). *Kunjungan Museum Batik Naik*. Dipetik Desember 13, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan:

http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=354:kunjungan-museum-batik-naik&catid=85:pelatihan&Itemid=130

Pemda Kota Pekalongan. (2010c, November 2). *Mendorong Sektor Pariwisata Melalui Batik*. Dipetik November 29, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan:

http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=267&catid=85&Itemid=130

Pemda Kota Pekalongan. (2010d, September 2). *Omzet Pedagang Pasar Grosir Setono Meningkat*. Dipetik Desember 8, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan:

http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=224:omzet-pedagang-pasar-grosir-setono-meningkat&catid=81:lainnya

Pemda Kota Pekalongan. (2010e, Desember 1). *Pasokan Bahan Baku Minim, Harga Batik Naik Hingga 20%*. Dipetik Desember 8, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan:

http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&

view=article&id=289:pasokan-bahan-baku-minim-harga-batik-naik-hingga-20&catid=85:pelatihan&Itemid=130

Pemda Kota Pekalongan. (2011i, November 11). *Pekalongan Bendung Tekstil Motif Batik China*. Dipetik November 29, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan:

http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=406:pekalongan-bendung-tekstil-motif-batik-china&catid=85:pelatihan&Itemid=130

Pemda Kota Pekalongan. (2011j, Oktober 18). *Penjualan Batik Khas Pekalongan Lesu*. Dipetik November 29, 2011, dari Disperindagkop: http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=401:penjualan-batik-khas-pekalongan-lesu&catid=76:perdagangan

Pemda Kota Pekalongan. (2011k, Maret 28). *Perajin Batik "Kemut-Kemut", Harga Mori Selangit*. Dipetik Desember 8, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan:

http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=331:perajin-batik-qkemut-kemutq-harga-mori-selangit&catid=85:pelatihan&Itemid=130

Pemda Kota Pekalongan. (2011l, Maret 14). *Perajin Batik Berharap Subsidi Gondorukem*. Dipetik Desember 8, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan:

http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=300:perajin-batik-berharap-subsidi-gondorukem&catid=85:pelatihan&Itemid=130

Pemda Kota Pekalongan. (2011m, Maret 17). *Perajin Batik Ingin Gondorukem Kualitas Tiga*. Dipetik Desember 8, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan:

http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=318:perajin-batik-inginkan-gondorukem-kualitas-tiga&catid=85:pelatihan&Itemid=130

Pemda Kota Pekalongan. (2011n, Maret 14). *Perajin Batik Keluhkan Harga Gondorukem*. Dipetik Desember 8, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan:

http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=311:perajin-batik-keluhkan-harga-gondorukem&catid=83:pelatihan

Pemda Kota Pekalongan. (2011o, Maret 14). *Perhutani Diminta Prioritaskan Gondorukem Bagi Pengrajin*. Dipetik Desember 10, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan:

http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&

view=article&id=308:perhutani-diminta-prioritaskan-gondorukem-bagi-perajin&catid=83:pelatihan

- Pemda Kota Pekalongan. (2010f, April 5). *Realisasi Ekspor Perusahaan dan Negara Tujuan Januari - November 2009 Kota Pekalongan*. Dipetik Desember 13, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan: http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=127:realisasi-ekspor&catid=71:realisasi-ekspor&Itemid=110
- Pemda Kota Pekalongan. (2010g, Desember). *Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010*. Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia: DPPKAD Kota Pekalongan.
- Pemda Kota Pekalongan. (2010h, November 23). *Sarung Batik Pekalongan Tembus Pasar Abu Dhabi*. Dipetik Desember 8, 2011, dari Disperindagkop Kota Pekalongan: http://perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=280:sarung-batik-pekalongan-tembus-pasar-abu-dhabi&catid=85:pelatihan&Itemid=130
- Prakoso, K. B. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah* (Vol. II). Yogyakarta: UII Press.
- Prihantono, N. (2011, September 21). (U. B. Primajaya, Pewawancara)
- Purnomo. (2009). *Analisis Kemandirian dan Kinerja Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Semarang dan Surakarta Tahun 2001-2006*. Solo: Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Puspita, I. (2009). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah di Surakarta (Studi Empiris di Surakarta Tahun Anggaran 2006-2007)*. *Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Surakarta.
- Putra, S. D. (2009, Desember 15). *Sejarah Perkembangan Batik*. Dipetik November 8, 2011, dari nuno photoworks and art design: <http://evo89cruiser.blogspot.com/2009/12/sejarah-perkembangan-batik.html>
- Radio Kota Batik. (2011, Mei 16). *Pengunjung Grosir Setono Meningkat*. Dipetik Desember 8, 2011, dari Radio Kota Batik.net: <http://www.radiokotabatik.net/2011/05/pengunjung-grosir-setono-meningkat.html>
- Rahmaddin. (2009, April 21). *Perencanaan Strategis (Strategic Planning)*. Dipetik Desember 17, 2011, dari WEBSITE OVALHANIF:

<http://ovalhanif.wordpress.com/2009/04/21/perencanaan-strategis-strategic-planning/>

- Resmiadi, A. S. (2010, April 18). *Strategi Industri*. Dipetik Desember 17, 2011, dari resmiadi [dot] com: <http://www.resmiadi.com/strategi-industri/>
- Risky, R. (2010). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bintan (2005-2009)*. Yogyakarta: Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suara Merdeka. (2010, Juni 11). *Pasar Grosir Setono Ditawarkan Rp 150 Miliar*. Dipetik Desember 22, 2011, dari Suara Merdeka.com: <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/06/11/112673/Pasar-Grosir-Setono-Ditawarkan-Rp-150-Miliar>
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, & Purwanto, S. K. (2004). *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern* (Vol. II). Jakarta: Salemba Empat.
- Suharyanto, B. (2011a, September 20). (U. B. Primajaya, Pewawancara)
- Suharyanto, B. (2011b, September 21). (U. B. Primajaya, Pewawancara)
- Warta Warga. (2010, Januari 5). *Sejarah Batik Indonesia*. Dipetik Desember 9, 2011, dari Warta Warga: <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/sejarah-batik-indonesia-6/>
- Wikipedia. (2011a, November 15). *Batik*. Dipetik November 17, 2011, dari Wikipedia: <http://id.wikipedia.org/wiki/Batik>
- Wikipedia. (2011b, November 5). *Kota Pekalongan*. Dipetik November 10, 2011, dari Wikipedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekalongan
- Wikipedia. (2011c, Desember 10). *Strategi*. Dipetik Desember 17, 2011, dari Wikipedia: <http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>
- Wulandari, N. (2010, Maret 29). *Perencanaan Strategik*. Dipetik Desember 17, 2011, dari WARTAWARGA: <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/perencanaan-strategik/>